



PEMERINTAH KOTA JAMBI

DINAS SOSIAL

Jln. Jend. Sudirman No. 156 – Jambi Selatan Telp. (0741) 24193 – Fax. (0741) 31682
Email: dinsoskotajambi@gmail.com, Website: dinsos.jambikota.go.id
Jambi - Kode Pos 36138

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI NOMOR 16.b TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KOTA JAMBI TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 97 ayat (7) bahwa Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis OPD dilaksanakan melalui Keputusan Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan, serta Pasal 97 ayat (8) bahwa Penetapan Rencana Strategis OPD oleh Kepala OPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra OPD disahkan oleh Kepala Daerah;

b. bahwa guna penetapan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Jambi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Jambi

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka Panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
9. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Dearah Kota Jambi Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Wali kota Jambi Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Perangkat Daerah Kota Jambi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KOTA JAMBI TAHUN 2025-2029.

KESATU : Dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Jambi ditetapkan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025-2029, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025-2029 dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, dijadikan sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Sosial Kota Jambi

KETIGA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 19 September 2025

KEPALA DINAS,



YUNITA INDRAWATI, AP, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19740607 199403 2 002



**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan | Akuntabel | Kompeten
Harmonis | Loyal | Adaptif | Kolaboratif

DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

RENCANA STRATEGIS

2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan petunjuk, taufik dan hidayah-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025 - 2029 dapat diselesaikan. Dalam Rencana Strategis ini disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025 – 2029 dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kementerian Sosial RI yang selanjutnya dituangkan dalam Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Jambi melalui program – program serta kegiatan – kegiatan prioritas disamping kegiatan – kegiatan lain sesuai dengan tugas pokok organisasi.

Penyusunan Renstra ini sangat disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan Renstra ini, semoga apa yang dihasilkan dari penyusunan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama Dinas Sosial Kota Jambi beserta perangkatnya.

Demikianlah penyusunan Rencana Strategis ini dibuat sebagai pedoman didalam melaksanakan tugas pelayanan kedinasan kepada masyarakat, dan kami sangat menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu tentunya mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif untuk kesempurnaan pelaksanaan tugas kedepan. Terima kasih.

Jambi, 19 September 2025

KERALA DINAS SOSIAL



YUNITA INDRAWATI, AP, MP, CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19740607 199403 2 002

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
 STRATEGIS DINAS SOSIAL KOTA JAMBI.....	12
 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat	
Daerah.....	12
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	19
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	46
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	60
 2.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kota Jambi.....	59
2.2.1 Permasalahan pelayanan perangkat daerah.....	61
2.2.2 Isu Strategis	65
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH	
 KEBIJAKAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI.....	67
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun	
2025-2029.....	67
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun	
2025-2029.....	68
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan	
dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029.....	72
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai	
Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029.....	73
3.5 Cascading Kinerja Dinas Sosial Kota Jambi.....	73
BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	
 DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	84
4.1 Uraian Program.....	84
4.2 Uraian Kegiatan.....	84
4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator	
Target dan Pagu Indikatif.....	85
4.4 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sosial.....	121
BAB V PENUTUP.....	127

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
TABEL 1	Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan Dinas Sosial Jambi Tahun 2025 19
TABEL 2	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan dan Eselon Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025..... 20
TABEL 3	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025..... 21
TABEL 4	Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Struktural & Fungsional Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025..... 21
TABEL 5	Jumlah PSKS Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025..... 22
TABEL 6	Daftar Alat-Alat Besar & Alat-Alat Angkutan..... 23
TABEL 7	Daftar Alat-Alat Kantor & Rumah Tangga..... 25
TABEL 8	Daftar Alat-alat Studio, Alat-Alat Komunikasi dan Pemancar Alat-Alat Kedokteran dan Kesehatan Alat-Alat Komputer, Alat Olahraga..... 38
TABEL 9	Daftar Pengadaan Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan 45
TABEL T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Jambi 59
TABEL T-C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kota Jambi..... 60
TABEL 3.3	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Jambi 69
TABEL 4.2	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Sosial Kota Jambi 90
TABEL 4.3	Rencana Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kota Jambi 98
TABEL 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 119
TABEL 4.5	Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Jambi..... 124
TABEL 4.6	Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Kota Jambi..... 125

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah Tahun 2025 – 2029. bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024 dan Daerah Otonomi Baru, mengamanatkan bahwa Daerah dengan Bupati/Walikota yang masa Jabatannya Berakhir Tahun 2024 agar menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 tersebut sebagai acuan Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis OPD.

Setelah terpilihnya Wali Kota Jambi dan Wakil Wali Kota Jambi Tahun 2025-2030 sebagai hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, maka dilaksanakan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Berdasarkan hal dimaksud Dinas Sosial Kota Jambi menyusun Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025- 2029.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025-2029 adalah merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial Kota Jambi untuk periode 2025-2029 sebagai acuan dalam proses perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Jambi yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah untuk jangka waktu lima tahun.

Renstra Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025-2029 juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti Renstra Kementerian Sosial, Renstra Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi serta sejumlah dokumen terkait lainnya.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025- 2029 ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol

terhadap semua aktivitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD). Proses penyusunan Rancangan Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rancangan RPJMD. Dalam hal ini Renstra Dinas Sosial Kota Jambi disusun untuk digunakan pada masa transisi perencanaan selama 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan RPJMD sebagai salah satu bagian komponen perencanaan di atasnya.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik perorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat dalam rangka peningkatan harkat, martabat dan kualitas hidupnya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar dan memecahkan berbagai permasalahan sosial yang timbul, dengan mengedepankan prakarsa dan kreativitas masyarakat melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya yang ada. Hal ini telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Pemerlu Atensi Sosial (PAS) yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial.

Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PAS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PAS, kemandirian dan keberfungsian sosial PAS, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (*volunteerism*), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia.

Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni adanya peningkatan produktivitas PAS sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Indonesia telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PAS yang jauh lebih besar jumlah dan

sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan.

Permasalahan kesejahteraan Sosial cenderung meningkat, seiring dengan derasnya arus globalisasi yang melanda dunia termasuk Indonesia, Sementara itu tuntutan masyarakat terhadap pelayanan sosial terus meningkat dan professional seiring dengan dengan Hak-haknya selaku warga Negara. Oleh sebab itu berbagai dampak positif dan negative dari persoalan sosial semakin meningkat. Pembangunan kesejahteraan Sosial ke depan akan semakin kompleks dan multi demisional, karena masalah sosial dan yang berada di lapisan bawah, yang dampaknya langsung berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti disintegrasi sosial, diskriminasi sosial, kesenjangan sosial, sistem nilai budaya bangsa (kesetiakawanan sosial) dan sebagainya.

Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah khususnya masalah kesejahteraan Sosial diperlukan adanya perencanaan yang komprehensif, dengan membuat rencana berupa Perencanaan Strategis OPD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Jambi dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI sebagai acuan OPD dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya untuk dapat mencapai sasaran yang diharapkan, dan untuk selanjutnya Perencanaan Strategis OPD tersebut tertuang dalam Dokumen yang disebut dengan : DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL KOTA JAMBI TAHUN 2025 - 2029.

Rencana Strategis atau yang lebih sering disebut RENSTRA adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum yang dipergunakan dalam Penyusunan Rencana Strategis(Renstra) Dinas Sosial Kota Jambi Periode 2025-2029 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6859);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 05);
23. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Tahun 2024 Nomor 10).
25. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor ...Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor);
26. Peraturan Walikota Jambi Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kota Jambi;
27. Surat Edaran Walikota Jambi Nomor 380 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra ini untuk meletakkan pedoman, kebijakan, arah dan sasaran serta program dan rencana strategis Dinas Sosial Kota Jambi untuk Jangka menengah sesuai dengan fungsi, kedudukan tugas sekretariat, bidang dan rincian tugas sub bagian, seksi dan tata kerja pada Dinas Sosial Kota Jambi untuk periode Tahun 2025

– 2029 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Jambi dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025 -2029 adalah :

1. Menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijaksanaan 5 (Lima) tahun kedepan.
2. Menetapkan Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran, Target Kinerja dan Pagu Pendanaan Indikatif sebagai rencana aksi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan.
3. Menetapkan Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.
4. Menetapkan Rencana Pencapaian Kinerja, Anggaran dan Realisasi Pendanaan Jangka Menengah Pelayanan PD

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana strategis Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah Tahun 2025 – 2029, terdiri dari 5 bab, dengan uraian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Dalam BAB Pendahuluan ini terdiri atas beberapa sub bab meliputi:

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang Renstra Perangkat Daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah Dinas Sosial dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian- capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan- hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi, serta berbagai permasalahan pembangunan yang diuraikan berdasarkan penyelenggaraan urusan Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan isu- isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang melalui Renstra Perangkat Daerah.

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

2.2. Permasalahan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan- permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel TB.35.

2.2.2 Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan

Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan Rencana Strategis(Renstra) Dinas Sosial Kota Jambi untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarnya.

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25.

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 20225-2029

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26. Tabel T-C.26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan tujuan dan sasaran RPD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran,strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan

strategi dan arah kebijakan tersebut.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan arah kebijakan dan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26. Tabel T-C.26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan tujuan dan sasaran RPD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB I V PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan uraian program, kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kinerja, target dan pagu indikatif sebagaimana dihasilkan dari Perumusan rencana program, serta kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini Memuat penjelasan Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Sosial merupakan salah satu OPD di Kota Jambi. Pendirian Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 50 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Sosial Kota Jambi, maka Dinas Sosial mempunyai tugas yaitu : "Membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Sosial yang meliputi : Tugas Perencanaan, Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pelayanan dan Pembangunan di bidang sosial serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya yang terdiri dari sekretariat dan empat bidang yang meliputi bidang jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan Perlindungan Sosial.

Fungsi OPD Dinas Sosial Kota Jambi untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Kota Jambi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Sosial Kota Jambi, mempunyai fungsi :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
- b. penetapan kriteria data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. penetapan standar rehabilitasi sosial;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas sosial;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab dinas sosial;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas sosial;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan dinas sosial di daerah;

- h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial;
- i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas sosial; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing organisasi yang ada pada Dinas Sosial Kota Jambi berdasarkan Peraturan Walikota Kota Jambi Nomor 50 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Sosial Kota Jambi terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat :

- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- Sekretariat mempunyai Tugas yaitu Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas kesekretariatan yang meliputi :
 - 1) Perencanaan dan program;
 - 2) Keuangan dan barang milik daerah;
 - 3) Umum dan kepegawaian; dan
 - 4) Tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai Fungsi sebagai berikut :
 - a) Perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
 - b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset serta evaluasi dan pelaporan;
 - c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian;
 - d) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian pelaksanaan urusan umum dan perencanaan, keuangan; dan

- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Bidang Jaminan Sosial

Bidang Jaminan Sosial berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang dan tugasnya. Bidang Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.

Kepala Bidang Jaminan Sosial mempunyai tugas dibidang Jaminan Sosial yang meliputi :

- a. Jaminan Sosial Keluarga;
- b. Pengumpulan, Pengolahan dan Pengkajian Data Kesejahteraan Sosial;
- c. Pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulant.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, dan koordinasi, jaminan sosial keluarga, pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data kesejahteraan Sosial, Pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulant;
- b. penyelenggaraan jaminan sosial keluarga, pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data kesejahteraan Sosial, Pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan jaminan sosial keluarga, pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data kesejahteraan sosial, serta pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang dan tugasnya. Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas dibidang Rehabilitasi Sosial yang meliputi :

- a. Rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti dan/lembaga;
- b. Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/lembaga
- c. Rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.

Untuk menjalankan tugas pokok sebagai mana dimaksud, bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, dan koordinasi rehabilitasi sosial;
- b. penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi Sosial yang meliputi anak dan lanjut usia terlantar, balita terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, penyandang disabilitas fisik dan sensorik, penyandang disabilitas mental dan intelektual, penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, bekas warga binaan Lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan di luar panti dan/lembaga, eks tuna Susila di luar panti dan/Lembaga;
- c. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasi dan dilaporkan kepada pemerintah Provinsi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang dan tugasnya. Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas di bidang Pemberdayaan Sosial yang meliputi :

- a. Pemberdayaan Sosial Perorangan dan keluarga;
- b. Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan;
- c. Pemberdayaan sosial kepahlawanan dan restorasi sosial.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, dan koordinasi, pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat, penerbitan izin pengumpulan sumbangan serta kepahlawanan dan restorasi sosial;
- b. Penyelenggaraan pemberdayaan Sosial perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat, penerbitan izin pengumpulan sumbangan serta kepahlawanan dan restorasi Sosial;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pemberdayaan Sosial perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat, penerbitan izin pengumpulan sumbangan serta kepahlawanan dan restorasi sosial;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Perlindungan Sosial

Bidang Perlindungan Sosial berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang dan tugasnya. Bidang Perlindungan Sosial dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris; Kepala Bidang Perlindungan sosial mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menjalankan tugas dibidang Perlindungan Sosial yang meliputi;

- a. Perlindungan sosial korban bencana alam
- b. Perlindungan sosial korban bencana non alam
- c. Perlindungan sosial korban bencana sosial

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, bidang perlindungan sosial, mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, perlindungan sosial korban bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial;
- b. penyelenggaraan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam, non alam dan bencana sosial ;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan perlindungan korban bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan Dinas Sosial dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

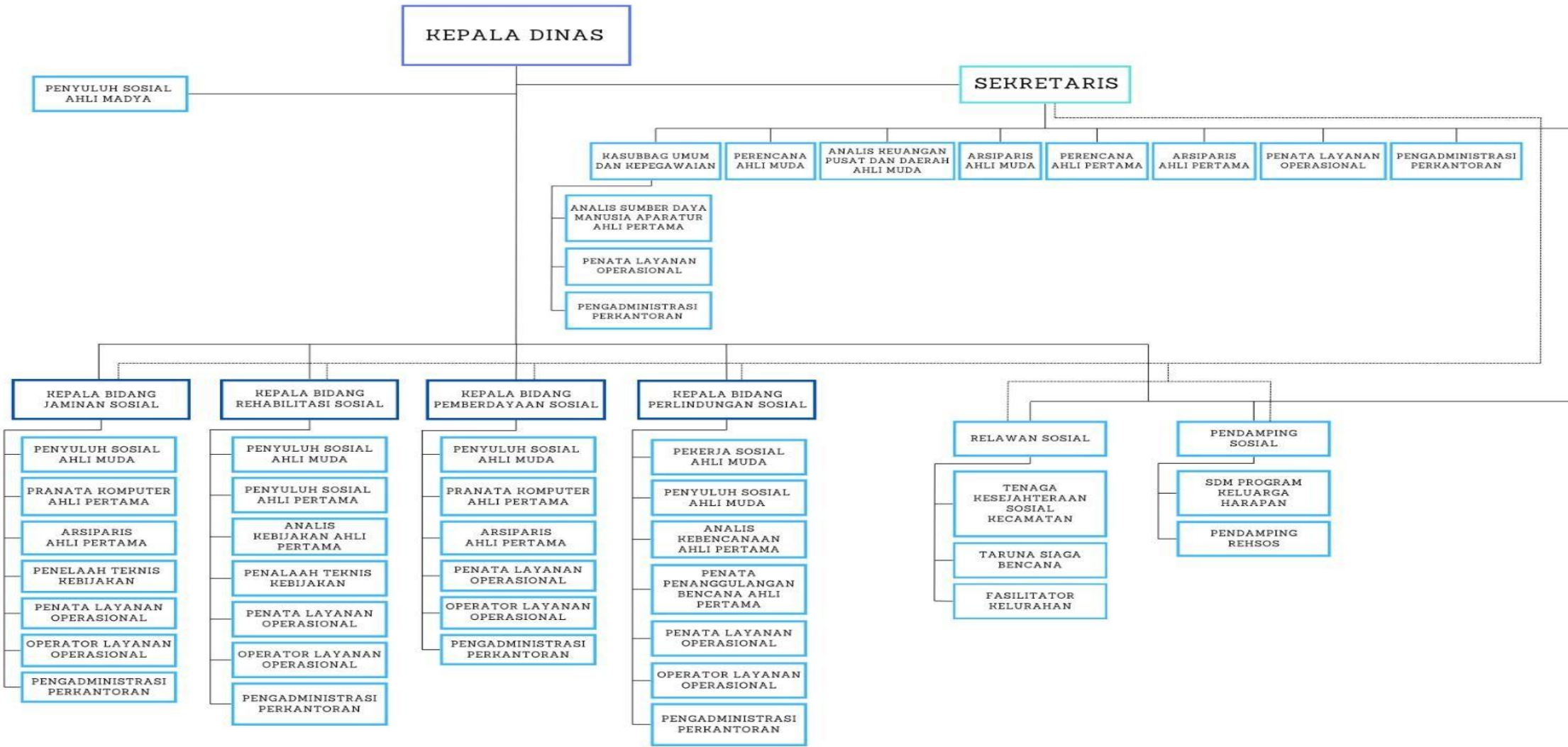
8. Struktur organisasi Dinas Sosial Kota Jambi

Susunan organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub bagian umum dan kepegawaian
- c. Bidang Jaminan Sosial;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial;
- f. Bidang Perlindungan Sosial; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KOTA JAMBI



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial Kota Jambi. Integritas dan kompetensi sumber daya manusia merupakan potensi utama dalam menjawab tuntutan pembangunan dan kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Sumber Daya Personil OPD yang merupakan faktor pendukung utama dalam melaksanakan Program Kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pelayanan di Bidang Sosial sangat di dukung oleh Kuantitas dan Kualitas Jumlah Pegawai pada Dinas Sosial Kota Jambi.

Hal ini dari dilihat dari Tabel Jumlah Pegawai menurut Jabatan, Eselon, Pangkat, Golongan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Diklat Penjenjangan Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Jambi tersebut di bawah ini yang terdiri dari :

Tabel. 1
Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan Dinas Sosial Jambi Tahun 2025

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	2	3	4
Dinas Sosial			
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2	Pembina Tk.I	IV/b	1
3	Pembina	IV/a	5
4	Penata Tk. I	III/d	12
5	Penata	III/c	-
6	Penata Muda Tk.I	III/b	3
7	Penata Muda	III/a	1
8	Pengatur Tk. I	II/d	1
9	Pengatur	II/c	-
10	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-
11	Pengatur Muda	II/a	-
12	Juru	I/c	1
13	PPPK	IX	34
14	PPPK	V	22
15	PPPK	I	3
Kementerian Sosial			
16	PPPK (Pendamping PKH)	IX	69
17	PPPK (Pendamping PKH)	VII	3
18	PPPK Paruh Waktu (Pendamping PKH)	IX	1
19	PPPK (Pendamping Rehsos)	IX	3
20	PPPK (Pendamping Rehsos)	VII	1
21	PPPK (Pendamping Rehsos)	V	2
JUMLAH			163

Sumber : DUK Dinsos Kota Jambi Tahun 2025

Tabel. 2

Jumlah Pegawai Menurut Jabatan dan Eselon Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH
1	2	3	4
Dinas Sosial			
1	Kepala Dinas	II.b	1
2	Sekretaris	III.a	1
3	Kepala Bidang	III.b	4
4	Kepala Sub Bagian	IV.a	1
5	Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda	-	8
6	Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Pertama	-	3
7	Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda	-	1
8	Fungsional Perencana Ahli Muda	-	1
9	Fungsional Perencana Ahli Pertama	-	2
10	Fungsional Analis Keuangan Daerah dan Pusat Ahli Muda	-	1
11	Fungsional Arsiparis Ahli Madya	-	1
12	Fungsional Arsiparis Ahli Pertama	-	3
13	Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Pertama	-	2
14	Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	-	2
15	Fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	-	1
16	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama	-	1
17	Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama	-	2
18	Penelaah Teknis Kebijakan	-	2
19	Pengadministrasi Perkantoran	-	12
20	Penata Layanan Operasional	-	18
21	Operator Layanan Operasional	-	14
22	Pengelola Umum Operasional	-	3
Kementerian Sosial			
23	Penata Layanan Operasional	-	73
24	Pengelola Layanan Operasional	-	4
25	Operator Layanan Operasional	-	2
JUMLAH			163

Sumber : DUK Dinsos Kota Jambi Tahun 2025

Tabel. 3

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Dinas Sosial Kota
Jambi Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
Dinas Sosial				
1	Pasca Sarjana (S2)	3	3	6
2	Sarjana (S1)/Diploma (IV)	23	25	48
3	Diploma (III)	-	2	2
4	Tingkat SLTA	15	10	25
5	Tingkat SD	3		3
Kementerian Sosial				
6	Pasca Sarjana (S2)	2	6	8
7	Sarjana (S1)/Diploma (IV)	28	37	65
8	Diploma (III)	-	4	4
	Tingkat SLTA		2	2
JUMLAH		74	89	163

Sumber : DUK Dinsos Kota Jambi Tahun 2025

Tabel. 4

Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Struktural & Fungsional
Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	Diklatpim II/Spati	1 Orang
2	Diklatpim III/Spama	5 Orang
3	Diklatpim IV/Adum/Adumla	9 Orang
4	Diklat Teknis Fungsional Bidang Sosial	1 Orang
5	Diklat Teknis Fungsional Bidang Lainnya	1 Orang
Jumlah		17 Orang

Sumber : DUK Dinsos Kota Jambi Tahun 2025

Tabel. 5
Jumlah PSKS Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025

No	Tenaga PSKS	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	1		1
2	Pendamping Rehsos	2	1	3
3	Taruna Siaga Bencana	22	8	30
4	Fasilitator Kelurahan	16	52	68
Jumlah		41	61	102

Sumber : DUK Dinsos Kota Jambi Tahun 2025

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Jambi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, sangat didukung oleh Sumber Daya Aset Tetap, Adapun Aset Tetap sebagai Modal pendukung kegiatan penyelenggaraan dan pelayanan administrasi pemerintahan yang meliputi Urusan Sosial , serta dibantu oleh Sekretariat pada Dinas Sosial Kota Jambi dapat dilihat pada Tabel sebagaimana yang tertera pada Daftar Lampiran Renstra Sumber Daya Aset Tetap Dinas Sosial Kota Jambi yang terdiri dari :

- 1) Peralatan dan Mesin
 - Alat-alat Besar
 - Alat-alat Angkutan
 - Alat-alat Kantor & Rumah Tangga
 - Alat-alat Studio
 - Alat - alat Komunikasi dan Pemancar
 - Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan
 - Alat-alat Komputer
 - Alat-alat Olahraga
- 2) Pengadaan Gedung dan Bangunan
- 3) Jalan Irigasi dan Jaringan

Tabel. 6									
DAFTAR ALAT-ALAT BESAR & ALAT-ALAT ANGKUTAN									
Pada OPD Dinas Sosial Kota Jambi Periode s/d Desember Tahun 2024									
No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kuantitas	Satuan	Tahun Pembelian	Sumber Dana	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8	7	10
	PERALATAN DAN MESIN								
	ALAT BESAR								
1	Mesin Pompa	Shimizu	1	Unit	2020	Biaya Tidak Terduga (BTT)			
2	Mesin Pompa Air	Shimizu	1	Unit	2021	APBD	✓		
3	Mesin Pompa Air	Sanyo	1	Unit	2021	APBD	✓		
	ALAT ANGKUTAN								
1	Mobil	TOYOTA	1	Unit	2005	APBD	✓		
2	Kendaraan Bermotor roda empat	Toyota	1	Unit	2008	APBD TA. 2010	✓		
3	Sepeda Motor	Honda Vario	1	Unit	2010	APBD TA. 2010	✓		
4	Sepeda Motor	Honda Vario	1	Unit	2010	APBD TA. 2010	✓		
5	Kendaraan Roda 2	HONDA REVO	1	Unit	2010	APBD TA. 2010	✓		
6	Kendaraan Roda 2	HONDA REVO	1	Unit	2010	APBD TA. 2010	✓		
7	Kendaraan Roda 2	HONDA REVO	1	Unit	2010	APBD TA. 2010	✓		
8	Kendaraan Roda 2	HONDA REVO	1	Unit	2010	APBD TA. 2010	✓		
9	Kendaraan Roda 2	HONDA VARIO	1	Unit	2010	APBD TA. 2011	✓		
10	Kendaraan Roda 2	Honda	1	Unit	2011	APBD TA. 2012	✓		
11	Kendaraan Roda 2	Yamaha	1	Unit	2012	APBD TA. 2012	✓		
12	Kendaraan Roda 2	Yamaha	1	Unit	2012	APBD TA. 2012	✓		
13	Kendaraan Roda 2	Yamaha	1	Unit	2012	APBD TA. 2012	✓		
14	Kendaraan Roda 4	Suzuki	1	Unit	2012	APBD TA. 2012	✓		
15	Kendaraan Roda 2	Yamaha	1	Unit	2012	APBD TA. 2012	✓		
16	Kendaraan Roda 4	Toyota/Hilux SC 4	1	Unit	2013	APBD T.A 2013	✓		
17	Kendaraan Roda 4	Mitsubishi Cold Diesel FE 71	1	Unit	2013	APBD T.A 2013	✓		
18	Karoseri dan Perlengkapan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Truck Pengangkut Logistic Tanggap Darurat Bencana	Truck/Mitsubishi	1	Unit	2013	APBD	✓		
19	Atk Pengadaan Mobil truck		1	Unit	2013	APBD T.A 2013	✓		

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kuantitas	Satuan	Tahun Pembelian	Sumber Dana	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8	7	10
20	Kendaraan Roda 2	Yamaha/1 UB A/T	1	Unit	2013	APBD T.A 2013	✓		
21	Kendaraan Roda 2	Yamaha/1 UB A/T	1	Unit	2013	APBD T.A 2013	✓		
22	Kendaraan Roda 2	Yamaha/1 UB A/T	1	Unit	2013	APBD T.A 2013	✓		
23	Kendaraan Roda 2	Yamaha/1 UB A/T	1	Unit	2013	APBD T.A 2013	✓		
24	Kendaraan Roda 2	Yamaha/1 UB A/T	1	Unit	2013	APBD T.A 2013	✓		
25	Kendaraan Roda 2	Yamaha/1 UB A/T	1	Unit	2013	APBD T.A 2013	✓		
26	Kendaraan Roda 2	Yamaha/1 UB A/T	1	Unit	2013	APBD	✓		
27	Kendaraan Dinas Roda 2	Yamaha BYSON	1	Unit	2014	APBD	✓		
28	Kendaraan Dinas Roda 2	Yamaha VGRADB	1	Unit	2014	APBD	✓		
29	kendaraan roda empat	Toyota Avanza 1,3 M/T NEW vin 2015	1	Unit	2015	APBD	✓		
30	Kendaraan Roda 4	KIJANG INOVA	1	Unit	2016	APBD	✓		
31	kendaraan roda empat	Suzuku New Ertiga	1	Unit	2016	APBD	✓		
32	Kendaraan Roda 2	ALL New Beat ESP CBS	1	Unit	2017	APBD	✓		
33	Kendaraan Bermotor Roda Dua	ALL New Beat ESP CBS	1	Unit	2017	APBD	✓		
34	Kendaraan Dinas Roda Empat	Toyota Calya/3 NR/G/M/T	1	Unit	2018	APBD	✓		
35	Mobil Ambulance	Minibus	1	Unit	2021	APBD	✓		
36	Toyota Hilux	Toyota Pick up Single Cabin 4x2 MT	1	Unit	2021	APBD	✓		
37	Kendaraan Roda 2	HONDA	1	Unit	2022	APBD	✓		
38	Kendaraan Roda 2	HONDA	1	Unit	2022	APBD	✓		
39	kendaraan roda empat	Suzuku New Ertiga	1	Unit	2016	APBD	✓		
40	Kendaraan Roda 2	ALL New Beat ESP CBS	1	Unit	2017	APBD	✓		

Sumber : LKPD Audited Tahun 2024 Dinsos Kota Jambi Tahun 2025

Tabel. 7

DAFTAR ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

Menurut Jenis Golongan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pada Dinas Sosial Kota Jambi

Periode s/d Desember Tahun 2024

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kuantitas	Satuan	Tahun Pembelian	Sumber Dana	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8	7	10
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA								
1	Terali Pintu		1	Unit	2007	APBD i TA. 2007	✓		
2	Terali Pintu		1	Unit	2007	APBD TA. 2007	✓		
3	Rak TV	Davanti	1	Unit	2008	APBD TA. 2008			
4	AC	Eskimo	1	Unit	2009	APBD TA. 2009	✓		
5	Kipas Angin Gantung	HTC	1	Unit	2009	APBD TA. 2009			
6	Filling Cabinet		1	Unit	2009	APBD	✓		
7	Tikar Plastik	plastik	1	Unit	2009	APBD			
8	AC 1 PK	Panasonic	1	Unit	2010	APBD	✓		
9	Papan Merek kantor ruang kessos		1	Unit	2010	APBD			
10	Papan Informasi papan daftar urut kepangkatan (DUK)	Panjang 245 cm, lebar 104 cm	1	Unit	2010	APBD			
11	Papan struktur organisasi	Panjang 245 cm, lebar 104 cm	1	Unit	2010	APBD	✓		
12	Papan visi misi disostek 2010	Panjang 245 cm, lebar 104 cm	1	Unit	2010	APBD			
13	Papan data kegiatan bidang	Panjang 105 cm , lebar 62 cm	1	Unit	2010	APBD			
14	papan merk ruangan	Panjang 32 cm, lebar 8 cm	1	Unit	2010	APBD			
15	Papan data bergambar disostek	fortuna	1	Unit	2010	APBD			
16	Tangga alumunium 4 tingkat		1	Unit	2010	APBD	✓		
17	Tiang bendera		1	Unit	2010	APBD			
18	Tiang bendera		1	Unit	2010	APBD	✓		
19	Podium		1	Unit	2010	APBD	✓		
20	Lambang Burung Garuda, Gambar		1	Unit	2010	APBD			
21	AC Split	LG	1	Unit	2010	APBD			
22	AC Split	LG	1	Unit	2010	APBD			
23	Papan Merk Rumah Pintar	Lokal	1	Unit	2010				
24	Lemari piring kaca		1	Unit	2010	APBD	✓		
25	Kursi Tamu		1	Unit	2010	APBD	✓		
26	Meja Kerja		1	Unit	2010	APBD	✓		

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kuantitas	Satuan	Tahun Pembelian	Sumber Dana	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Meja Kerja		1	Unit	2010	APBD			
28	Meja Kerja		1	Unit	2010	APBD			
29	Meja Kerja		1	Unit	2010	APBD			
30	Meja Kerja		1	Unit	2010	APBD			
31	Kursi Putar Sandaran Tinggi	BABYKU	1	Unit	2010	APBD	✓		
32	Lemari Arsip dinding ruang keuangan (5 tingkat uk 2,8x 2m pintu slidding door)		1	Unit	2010	APBD	✓		
33	Lemari Arsip dinidng ruang umum kepegawaian (5 tingkat uk, 2,7x2m pintu slidding door)		1	Unit	2010	APBD	✓		
34	Lemari Arsip dinidng ruang umum kepegawaian (5		1	Unit	2010	APBD	✓		
35	Filling Kabinet		1	Unit	2010	APBD			
36	Filling Kabinet		1	Unit	2010	APBD	✓		
37	Mesin Potocopy		1	Unit	2011	APBD			
38	Racun Api Standar		1	Unit	2011	APBD TA. 2011	✓		
39	Racun Api Standar		1	Unit	2011	APBD TA. 2011	✓		
40	Racun Api Standar		1	Unit	2011	APBD TA. 2011	✓		
41	Racun Api Standar		1	Unit	2011	APBD TA. 2011	✓		
42	Kulkas	Sanyo	1	Unit	2011	APBD	✓		
43	Rak Lemari Gudang Bantuan Sosial		1	Unit	2011	APBD TA. 2011			
44	Meja Rapat	Lokal	1	Unit	2011	APBD			
45	Kursi Tamu	Donati	1	Unit	2012	APBD			
46	filling kabinet		1	Unit	2012	APBD			
47	meja kerja		1	Unit	2012	APBD TA. 2012			
48	meja kerja		1	Unit	2012	APBD TA. 2012			
49	meja kerja		1	Unit	2012	APBD TA. 2012			
50	meja kerja		1	Unit	2012	APBD TA. 2012			
51	kursi sandaran putar sedang	FRONT LINE	1	Unit	2012	APBD TA. 2012	✓		
52	kursi sandaran putar sedang	FRONT LINE	1	Unit	2012	APBD TA. 2012			
53	kursi sandaran putar sedang	FRONT LINE	1	Unit	2012	APBD TA. 2012			
54	kursi sandaran putar sedang	FRONT LINE	1	Unit	2012	APBD TA. 2012			
55	tabung pemadam kebakaran	ABC Powder	1	Unit	2012	APBD TA. 2012			
56	kursi sandaran putar sedang	FRONT LINE	1	Unit	2012	APBD TA. 2012			
57	karpel/ambal sholat		1	Unit	2012	APBD			
58	Almari arsip		1	Unit	2012	APBD			
59	papan data rawan resiko bencana		1	Unit	2012	APBD TA. 2012	✓		
60	papan data rawan resiko bencana		1	Unit	2012	APBD TA. 2012	✓		

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kuantitas	Satuan	Tahun Pembelian	Sumber Dana	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8	7	10
61	papan data rawan resiko bencana		1	Unit	2012	APBD TA. 2012	✓		
62	karpel/ambal sholat		1	Unit	2012	APBD TA. 2012			
63	tabung pemadam kebakaran	ABC Powder	1	Unit	2012	APBD TA. 2012	✓		
64	tabung pemadam kebakaran	ABC Powder	1	Unit	2012	APBD TA. 2012	✓		
65	tabung pemadam kebakaran	ABC Powder	1	Unit	2012	APBD TA. 2012	✓		
66	AC	GREE	1	Unit	2012	APBD TA. 2012	✓		
67	AC	GREE	1	Unit	2012	APBD TA. 2012	✓		
68	meja kerja		1	Unit	2012	APBD TA. 2012			
69	Filling Cabinet		1	Unit	2012	APBD TA. 2012	✓		
70	lemari		1	Unit	2012	APBD TA. 2012	✓		
71	filling kabinet		1	Unit	2012	APBD TA. 2012			
72	papan data rawan resiko bencana		1	Unit	2012	APBD TA. 2012	✓		
73	laptop/notebook		1	Unit	2012	APBD TA. 2012			
74	Lemari arsip dinding		1	Unit	2013	APBD	✓		
75	Lemari arsip dinding		1	Unit	2013	APBD	✓		
76	Lemari arsip dinding		1	Unit	2013	APBD	✓		
77	Lemari arsip dinding		1	Unit	2013	APBD	✓		
78	Tabung pemadam kebakaran	ABC POWDER	1	Unit	2013	APBD	✓		
79	Tabung pemadam kebakaran	ABC POWDER	1	Unit	2013	APBD	✓		
80	AC 1 PK	GREE	1	Unit	2013	APBD	✓		
81	AC 1 PK	GREE	1	Unit	2013	APBD	✓		
82	AC 1 PK	GREE	1	Unit	2013	APBD	✓		
83	AC 1 PK	GREE	1	Unit	2013	APBD	✓		
84	AC 1 PK	GREE	1	Unit	2013	APBD	✓		
85	Papan data ketenagakerjaan	panjang 245 cm, leba	1	Unit	2013	APBD			
86	Papan informasi dat PMKS	panjang 245 cm, leba	1	Unit	2013	APBD			
87	Papan informasi running text	tinggi 3,5 cm	1	Unit	2013	APBD	✓		
88	Vakum cleaner	MIYAKO 7100	1	Unit	2013	APBD	✓		
89	Almari buku	Lokal	1	Unit	2013	APBD			
90	Rak	Lokal	1	Unit	2013	APBD			

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kuantitas	Satuan	Tahun Pembelian	Sumber Dana	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8	7	10
91	Mixer	Black Spider	1	Unit	2013	APBD			
92	Meja rapat ruang aula	tinggi 65 cm, panjang 250 mm, lebar 55 cm	1	Unit	2013	APBD			
93	Meja rapat ruang aula	tinggi 65 cm, panjang 250 mm, lebar 55 cm	1	Unit	2013	APBD			
94	Meja rapat	meja bulat tinggi 760 cm, panjang 480 cm	1	Unit	2013	APBD			
95	Kursi stenlis ruang tunggu	kursi tunggu stenlis 3 buah kursi gandeng	1	Unit	2013	APBD			
96	Kursi putar sandaran sedang	OCS/OI kursi jok putar 4 roda sandaran tinggi	1	Unit	2013	APBD			
97	Kursi putar sandaran sedang	OCS/OI kursi jok putar 4 roda sandaran tinggi	1	Unit	2013	APBD			
98	Kursi putar sandaran sedang	OCS/OI kursi jok putar 4 roda sandaran tinggi	1	Unit	2013	APBD			
99	Kursi putar sandaran sedang	OCS/OI kursi jok putar 4 roda sandaran tinggi	1	Unit	2013	APBD			
100	Kursi putar sandaran sedang	OCS/OI kursi jok putar 4 roda sandaran tinggi	1	Unit	2013	APBD			
101	Kursi putar sandaran sedang	OCS/OI kursi jok putar 4 roda sandaran tinggi	1	Unit	2013	APBD			
102	Kursi putar sandaran sedang	OCS/OI kursi jok putar 4 roda sandaran tinggi	1	Unit	2013	APBD			
103	Kursi putar sandaran sedang	OCS/OI kursi jok putar 4 roda sandaran tinggi	1	Unit	2013	APBD			
104	Kursi putar sandaran sedang	OCS/OI kursi jok putar 4 roda sandaran tinggi	1	Unit	2013	APBD			
105	Kursi putar sandaran tinggi	MI/OI Cati kursi jok putar 4 roda sandaran tinggi	1	Unit	2013	APBD	✓		
106	Kursi stenlis ruang tunggu	FDC 410, kursi gandeng 3	1	Unit	2013	APBD	✓		
107	Kursi stenlis ruang tunggu	FDC 410, kursi gandeng 3	1	Unit	2013	APBD	✓		
108	Kursi stenlis ruang tunggu	FDC 410, kursi gandeng 3	1	Unit	2013	APBD	✓		
109	Kursi stenlis ruang tunggu	FDC 410, kursi gandeng 3	1	Unit	2013	APBD	✓		
110	Iemari rak gudang logistik ben	kayu lapis triplek dan reng kayu	1	Unit	2014	APBD			
111	Meja Kerja (1 Set)		1	Unit	2014	APBD			
112	kursi tamu (kursi tinggi stenlis	FDC 410	1	Unit	2014	APBD			
113	kursi tamu (kursi tinggi stenlis	FDC 410	1	Unit	2014	APBD			
114	kursi tamu (kursi tinggi stenlis	FDC 410	1	Unit	2014	APBD			
115	Lemari Rak Buku Untuk Perpustakaan Rumah Pintar		1	Unit	2014	APBD	✓		
116	Lemari Rak Buku Untuk Perpustakaan Rumah Pintar		1	Unit	2014	APBD	✓		
117	Lemari Rak Buku Untuk Perpustakaan Rumah Pintar		1	Unit	2014	APBD	✓		
118	Karpet (18 meter)		1	Unit	2014	APBD		✓	
119	Hordeng		1	Unit	2014	APBD		✓	
120	Lemari Rak Buku Untuk Perpustakaan Rumah Pintar		1	Unit	2014	APBD	✓		
121	Dispenser	Mayaka	1	Unit	2014	APBD	✓		
122	Dispenser	Sanken	1	Unit	2014	APBD	✓		
123	Dispenser	Sanken	1	Unit	2014	APBD			
124	AC 1 PK	GREE	1	Unit	2014	APBD			
125	AC 1 PK	GREE	1	Unit	2014	APBD			
126	AC 2 PK	GREE	1	Unit	2014	APBD	✓		

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kuantitas	Satuan	Tahun Pembelian	Sumber Dana	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8	7	10
127	Mesin Penyemprot Air	Fujiyama	1	Unit	2014	APBD			
128	Papan data Informasi PKH	kayu lapis triplek dan reng kayu	1	Unit	2014	APBD			
129	Papan data Informasi PKH	kayu lapis triplek dan reng kayu	1	Unit	2014	APBD			
130	Papan Pengumuman Pakai Roda		1	Unit	2014	APBD			
131	Papan Pengumuman Pakai Roda		1	Unit	2014	APBD			
132	Papan Pengumuman Pakai Roda		1	Unit	2014	APBD			
133	Papan Pengumuman Pakai Roda		1	Unit	2014	APBD			
134	Papan Pengumuman Pakai Roda		1	Unit	2014	APBD			
135	Air Conditioner (1 PK)	LG T09NL Standard	1	Unit	2015	APBD	✓		
136	Air Conditioner (1 PK)	LG T09NL Standard	1	Unit	2015	APBD	✓		
137	Air Conditioner (1 PK)	LG T09NL Standard	1	Unit	2015	APBD	✓		
138	Air Conditioner (2 PK)	LG S18NLAN51	1	Unit	2015	APBD	✓		
139	Air Conditioner (2 PK)	LG S18NLAN51	1	Unit	2015	APBD	✓		
140	Bendera Hias/Umbul-umbul	Bendera Warna Merah Putih berbentuk	1	Unit	2015	APBD			
141	Dispenser	Sharp	1	Unit	2015	APBD	✓		
142	Dispenser	Sharp	1	Unit	2015	APBD			
143	Hordeng	Sharp Point Vertical Blind	1	Unit	2015	APBD		✓	
144	Meja Kerja 1/2 Biro	Warior	1	Unit	2015	APBD			
145	Meja Kerja 1/2 Biro	Warior	1	Unit	2015	APBD			
146	Meja Kerja 1/2 Biro	Warior	1	Unit	2015	APBD	✓		
147	Meja Kerja 1/2 Biro	Warior	1	Unit	2015	APBD	✓		
148	Meja Kerja 1/2 Biro	Warior	1	Unit	2015	APBD	✓		
149	Kursi Kerja	Phoenik	1	Unit	2015	APBD	✓		
150	Kursi Kerja	Phoenik	1	Unit	2015	APBD	✓		
151	Kursi Kerja	Phoenik	1	Unit	2015	APBD	✓		
152	Lemari Arsip Dinding	Warior	1	Unit	2015	APBD			
153	Rak Arsip	Warior	1	Unit	2015	APBD			
154	Filling Kabinet		1	Unit	2015	APBD			
155	Mesin Absensi		1	Unit	2015	APBD			
156	Filling Kabinet		1	Unit	2015	APBD			
157	Filling Kabinet		1	Unit	2015	APBD			
158	Filling Kabinet Ruang Kerja		1	Unit	2016	APBD	✓		
159	Filling Kabinet Ruang Arsip		1	Unit	2016	APBD	✓		
160	Kursi Jok Sandaran tinggi	Pantoni	1	Unit	2016	APBD	✓		

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kuantitas	Satuan	Tahun Pembelian	Sumber Dana	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
161	Almari/Rak gudang		1	Unit	2016	APBD	✓		
162	Air Conditioner (AC) 1 PK	LG	1	Unit	2016	APBD	✓		
163	Pemasangan Teralis		1	Unit	2016	APBD			
164	Kipas angin Blower	Seksi/IST2676 daya 210 watt	1	Unit	2017	APBD	✓		
165	Kipas angin Blower	Seksi/IST2676 daya 210 watt	1	Unit	2017	APBD	✓		
166	CCTV	Tanaka	1	Unit	2017	APBD			✓
167	CCTV	Tanaka	1	Unit	2017	APBD			✓
168	CCTV	Tanaka	1	Unit	2017	APBD			✓
169	CCTV	Tanaka	1	Unit	2017	APBD			✓
170	CCTV	Tanaka	1	Unit	2017	APBD			✓
171	Hordeng		1	Unit	2017	APBD		✓	
172	Hordeng		1	Unit	2017	APBD		✓	
173	Hordeng		1	Unit	2017	APBD		✓	
174	Hordeng		1	Unit	2017	APBD		✓	
175	Hordeng		1	Unit	2017	APBD		✓	
176	Hordeng		1	Unit	2017	APBD		✓	
177	Hordeng		1	Unit	2017	APBD		✓	
178	Hordeng		1	Unit	2017	APBD		✓	
179	Hordeng		1	Unit	2017	APBD		✓	
180	Hordeng		1	Unit	2017	APBD		✓	
181	Karpet	Extacy/motf eksklusif corak abstrak dan	1	Unit	2017	APBD		✓	
182	Karpet	Extacy/motf eksklusif corak abstrak dan	1	Unit	2017	APBD		✓	
183	Karpet	Extacy/motf eksklusif corak abstrak dan	1	Unit	2017	APBD		✓	
184	Karpet	Extacy/motf eksklusif corak abstrak dan	1	Unit	2017	APBD		✓	
185	Dispenser	Modena/DD06 Seri D064E40186027L6	1	Unit	2018	APBD			
186	Kursi Kerja	Frontline	1	Unit	2018	APBD	✓		
187	Kursi Kerja	Frontline	1	Unit	2018	APBD			
188	Kursi Kerja	Frontline	1	Unit	2018	APBD			
189	Meja Kerja	Aktive	1	Unit	2018	APBD	✓		
190	Filing Kabinet		1	Unit	2018	APBD			
191	Filing Kabinet		1	Unit	2018	APBD	✓		
192	Kipas Angin Blower	Sekai/ IST2676M	1	Unit	2018	APBD			✓
193	Kipas Angin Blower	Sekai/ IST2676M	1	Unit	2018	APBD			✓
194	AC Stand	AUX	1	Unit	2019	APBD			
195	Filing Kabinet		1	Unit	2019	APBD	✓		
196	Filing Kabinet		1	Unit	2019	APBD	✓		
197	Filing Kabinet		1	Unit	2019	APBD	✓		
198	Filing Kabinet		1	Unit	2019	APBD	✓		
199	Filing Kabinet		1	Unit	2019	APBD	✓		

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kuantitas	Satuan	Tahun Pembelian	Sumber Dana	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
200	Mesin Absensi		1	Unit	2019	APBD	✓		
201	Meja Kerja staf	Ekpo	1	Unit	2019	APBD	✓		
202	Meja Kerja staf	Ekpo	1	Unit	2019	APBD	✓		
203	Meja Kerja staf	Ekpo	1	Unit	2019	APBD	✓		
204	Meja Kerja staf	Ekpo	1	Unit	2019	APBD			
205	Meja Kerja staf	Ekpo	1	Unit	2019	APBD			
206	Meja Receptionist Kantor	Exspo	1	Unit	2019	APBD	✓		
207	Kursi Jok Sandaran Tinggi Eselon II	Frontine	1	Unit	2019	APBD			
208	Kursi Jok Sandaran Tinggi Eselon III	Olkana Chair	1	Unit	2019	APBD			
209	Kursi Jok Sandaran Tinggi Eselon III	Olkana Chair	1	Unit	2019	APBD			
210	Kursi Jok Sandaran Tinggi Eselon IV	Frontine	1	Unit	2019	APBD			
211	Kursi Jok Sandaran Tinggi Eselon IV	Frontine	1	Unit	2019	APBD			
212	Karpet	Modeno	1	Unit	2020	APBD	✓		
213	Karpet	Modeno	1	Unit	2020	APBD	✓		
214	Karpet	Modeno	1	Unit	2020	APBD	✓		
215	Karpet	Modeno	1	Unit	2020	APBD	✓		
216	Dispencer	Miyako	1	Unit	2020	APBD	✓		
217	Dispencer	Miyako	1	Unit	2020	APBD	✓		
218	Hordeng	-	1	Unit	2020	APBD	✓		
219	Hordeng	-	1	Unit	2020	APBD	✓		
220	Meja Rapat	-	1	Unit	2020	APBD			
221	AC	AUX	1	Unit	2020	APBD			
222	AC	AUX	1	Unit	2020	APBD			
223	AC	AUX	1	Unit	2020	APBD			
224	AC	AUX	1	Unit	2020	APBD			
225	AC Stand	AUX	1	Unit	2020	APBD			
226	CCTV COVR 16 CH lengkap HD 2 Tera		1	Unit	2020	Biaya Tidak Terduga (BTT)	✓		
227	Meja Kerja Front Office	-	1	Unit	2020	APBD			
228	Filling Kabinet	Local	1	Unit	2021	APBD	✓		
229	Kursi Jok Sandaran Tinggi	Indachi	1	Unit	2021	APBD	✓		
230	Kursi Jok Sandaran Tinggi	Indachi	1	Unit	2021	APBD	✓		
231	Kursi Tunggu Stainless	Local	1	Unit	2021	APBD	✓		
232	Kursi Tunggu Stainless	Local	1	Unit	2021	APBD	✓		
233	Meja Kerja 1 Biro	Frontline 1 biro	1	Unit	2021	APBD	✓		
234	Meja Kerja 1 Biro	Frontline 1 biro	1	Unit	2021	APBD	✓		
235	Sofa	Local	1	Unit	2021	APBD	✓		
236	Dispenser	Local	1	Unit	2021	APBD	✓		
237	Dispenser	Local	1	Unit	2021	APBD	✓		
238	Dispenser	Local	1	Unit	2021	APBD	✓		
239	Bed Susun + Kasur	Orbitren Ranjang Susun	1	Unit	2021	APBD	✓		
240	Bed Susun + Kasur	Orbitren Ranjang Susun	1	Unit	2021	APBD	✓		

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kuantitas	Satuan	Tahun Pembelian	Sumber Dana	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8	7	10
241	Bed Susun + Kasur	Orbitren Ranjang Susun	1	Unit	2021	APBD	✓		
242	Genset	Local	1	Unit	2021	APBD	✓		
243	Tandu Lipat	Gea Medical	1	Unit	2021	APBD	✓		
244	Tandu Lipat	Gea Medical	1	Unit	2021	APBD	✓		
245	Sirine		1	Unit	2021	Mutasi Masuk Dari			
246	Bed Susun + Kasur	Orbitren Ranjang Susun	1	Unit	2021	APBD	✓		
247	Bed Susun + Kasur	Orbitren Ranjang Susun	1	Unit	2021	APBD	✓		
248	Bed Susun + Kasur	Orbitren Ranjang Susun	1	Unit	2021	APBD	✓		
249	Bed Susun + Kasur	Orbitren Ranjang Susun	1	Unit	2021	APBD	✓		
250	Televisi	LED	1	Unit	2021	APBD	✓		
251	Kitchen Set	Olimpic	1	Unit	2021	APBD	✓		
252	Kipas Angin Turbo	Local Regency TST-16	1	Unit	2021	APBD	✓		
253	Lemari Es 2 Pintu	Local	1	Unit	2021	APBD	✓		
254	AC 1 PK	Local AC Split	1	Unit	2021	APBD	✓		
255	AC 1 PK	Local AC Split	1	Unit	2021	APBD	✓		
256	AC 1 PK	Local AC Split	1	Unit	2021	APBD	✓		
257	AC 1 PK	Local AC Split	1	Unit	2021	APBD	✓		
258	AC 1 PK	Local AC Split	1	Unit	2021	APBD	✓		
259	AC 1 PK	Local AC Split	1	Unit	2021	APBD	✓		
260	AC 1 PK	Local AC Split	1	Unit	2021	APBD	✓		
261	AC 1 PK	Local AC Split	1	Unit	2021	APBD	✓		
262	AC 1 PK	Local AC Split	1	Unit	2021	APBD	✓		
263	AC 1 PK	Local AC Split	1	Unit	2021	APBD	✓		
264	AC 1 PK	Local AC Split	1	Unit	2021	APBD	✓		
265	AC 1 PK	Local AC Split	1	Unit	2021	APBD	✓		
266	Alat Pemadam Api Ringan	KF-06 Jenis	1	Unit	2021	APBD	✓		
267	Alat Pemadam Api Ringan	KF-06 Jenis	1	Unit	2021	APBD	✓		
268	Alat Pemadam Api Ringan	KF-06 Jenis	1	Unit	2021	APBD	✓		
269	Alat Pemadam Api Ringan	KF-06 Jenis	1	Unit	2021	APBD	✓		
270	Alat Pemadam Api Ringan	KF-06 Jenis	1	Unit	2021	APBD	✓		
271	Alat Pemadam Api Ringan	KF-06 Jenis	1	Unit	2021	APBD	✓		
272	Alat Pemadam Api Ringan	KF-06 Jenis	1	Unit	2021	APBD	✓		
273	Alat Pemadam Api Ringan	KF-06 Jenis	1	Unit	2021	APBD	✓		
274	Alat Pemadam Api Ringan	KF-06 Jenis	1	Unit	2021	APBD	✓		
275	Meja Rapat	Expo - MD 1675, MD 1840	1	Unit	2021	APBD			
276	Meja 1/2 Biro	Biro Frontline 120 + Laci	1	Unit	2021	APBD	✓		
277	Rak Piring Aluminium		1	Unit	2021	APBD	✓		
278	Gorden	Vertical Blind	1	Unit	2021	APBD	✓		

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kuantitas	Satuan	Tahun Pembelian	Sumber Dana	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8	7	10
279	kursi Jok Sandaran Tinggi		1	Unit	2022	APBD	✓		
280	kursi Jok Sandaran Tinggi		1	Unit	2022	APBD	✓		
281	kursi Jok Sandaran Tinggi		1	Unit	2022	APBD	✓		
282	Kursi Tamu		1	Unit	2022	APBD	✓		
283	Lemari Pakaian		1	Unit	2022	APBD	✓		
284	Lemari Pakaian		1	Unit	2022	APBD	✓		
285	Lemari Pakaian		1	Unit	2022	APBD	✓		
286	Lemari Pakaian		1	Unit	2022	APBD	✓		
287	Lemari Pakaian		1	Unit	2022	APBD	✓		
288	Lemari Pakaian		1	Unit	2022	APBD	✓		
289	Lemari Pakaian		1	Unit	2022	APBD	✓		
290	Meja		1	Unit	2022	APBD	✓		
291	Meja		1	Unit	2022	APBD	✓		
292	Meja		1	Unit	2022	APBD	✓		
293	Meja		1	Unit	2022	APBD	✓		
294	Meja		1	Unit	2022	APBD	✓		
295	Meja		1	Unit	2022	APBD	✓		
296	Meja		1	Unit	2022	APBD	✓		
297	Meja		1	Unit	2022	APBD	✓		
298	Meja		1	Unit	2022	APBD	✓		
299	Meja		1	Unit	2022	APBD	✓		
300	Meja		1	Unit	2022	APBD	✓		
301	AC 1 PK	Local	1	Unit	2022	APBD	✓		
302	Tedmon		1	Unit	2022	APBD	✓		
303	Tedmon		1	Unit	2022	APBD	✓		
304	Kursi Roda	Onemed/F5675	1	Unit	2023	APBD	✓		
305	Kursi Roda	Onemed/F5675	1	Unit	2023	APBD	✓		
306	Kursi Roda	Onemed/F5675	1	Unit	2023	APBD	✓		
307	Kursi Roda	Onemed/F5675	1	Unit	2023	APBD	✓		
308	Kursi Roda	Onemed/F5675	1	Unit	2023	APBD	✓		
309	Kursi kerja pejabat eselon III	Dalton	1	Unit	2023	APBD	✓		
310	Kursi kerja pejabat eselon III	Dalton	1	Unit	2023	APBD	✓		
311	Kursi kerja pejabat eselon III	Dalton	1	Unit	2023	APBD	✓		
312	Kursi kerja pejabat eselon III	Dalton	1	Unit	2023	APBD	✓		
313	Kursi kerja pegawai non struktural	Dalton	1	Unit	2023	APBD	✓		
314	Kursi kerja pegawai non struktural	Dalton	1	Unit	2023	APBD	✓		
315	Kursi kerja pegawai non struktural	Dalton	1	Unit	2023	APBD	✓		
316	Kursi kerja pegawai non struktural	Dalton	1	Unit	2023	APBD	✓		
317	Kursi kerja pegawai non struktural	Dalton	1	Unit	2023	APBD	✓		

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kuantitas	Satuan	Tahun Pembelian	Sumber Dana	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8	7	10
318	Kursi kerja pegawai non struktural	Dalton	1	Unit	2023	APBD	✓		
319	Kursi kerja pegawai non struktural	Dalton	1	Unit	2023	APBD	✓		
320	Kursi kerja pegawai non struktural	Dalton	1	Unit	2023	APBD	✓		
321	Kursi kerja pegawai non struktural	Dalton	1	Unit	2023	APBD	✓		
322	Kursi kerja pegawai non struktural	Dalton	1	Unit	2023	APBD	✓		
323	Kursi kerja pegawai non struktural	Dalton	1	Unit	2023	APBD	✓		
324	Kursi kerja pegawai non struktural	Dalton	1	Unit	2023	APBD	✓		
325	Kursi kerja pegawai non struktural	Dalton	1	Unit	2023	APBD	✓		
326	Kursi kerja pegawai non struktural	Dalton	1	Unit	2023	APBD	✓		
327	Kursi kerja pegawai non struktural	Dalton	1	Unit	2023	APBD	✓		
328	Bangku tunggu (stainlees)		1	Unit	2023	APBD	✓		
329	Kursi biasa		1	Unit	2023	APBD	✓		
330	Kursi biasa		1	Unit	2023	APBD	✓		
331	Kursi biasa		1	Unit	2023	APBD	✓		
332	Kursi biasa		1	Unit	2023	APBD	✓		
333	Lemari arsip		1	Unit	2023	APBD	✓		
334	Lemari arsip		1	Unit	2023	APBD	✓		
335	Meja 1 biro (meja kerja kayu)		1	Unit	2023	APBD	✓		
336	Tempat tidur tingkat		1	Unit	2023	APBD	✓		
337	Tempat tidur tingkat		1	Unit	2023	APBD	✓		
338	Mesin Penghancur Kertas (AKL)	ECURE	1	Unit	2013	APBD	✓		
339	Filling Cabinet	lion	1	Unit	2012	APBD T.A 2013	✓		
340	horden/ vertical glind		1	Unit	2023	APBD	✓		
341	mesin cuci	POLYTRON	1	Unit	2023	APBD	✓		
342	Dispenser		1	Unit	2023	APBD	✓		
343	Dispenser		1	Unit	2023	APBD	✓		
344	Lemari pakaian kecil		1	Unit	2023	APBD	✓		
345	Lemari pakaian kecil		1	Unit	2023	APBD	✓		
346	Kipas angin dinding		1	Unit	2023	APBD	✓		
347	Kipas angin dinding		1	Unit	2023	APBD	✓		
348	Kipas angin dinding		1	Unit	2023	APBD	✓		
349	Kipas angin dinding		1	Unit	2023	APBD	✓		
350	Bantal		1	Unit	2023	APBD	✓		

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kuantitas	Satuan	Tahun Pembelian	Sumber Dana	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8	7	10
351	Bantal		1	Unit	2023	APBD	✓		
352	Bantal		1	Unit	2023	APBD	✓		
353	Bantal		1	Unit	2023	APBD	✓		
354	Bantal		1	Unit	2023	APBD	✓		
355	Bantal		1	Unit	2023	APBD	✓		
356	Bantal		1	Unit	2023	APBD	✓		
357	Bantal		1	Unit	2023	APBD	✓		
358	Perlak		1	Unit	2023	APBD	✓		
359	Perlak		1	Unit	2023	APBD	✓		
360	Perlak		1	Unit	2023	APBD	✓		
361	Perlak		1	Unit	2023	APBD	✓		
362	Perlak		1	Unit	2023	APBD	✓		
363	Perlak		1	Unit	2023	APBD	✓		
364	Perlak		1	Unit	2023	APBD	✓		
365	Perlak		1	Unit	2023	APBD	✓		
366	kasur busa		1	Unit	2023	APBD	✓		
367	kasur busa		1	Unit	2023	APBD	✓		
368	sprei / alas kasur		1	Unit	2023	APBD	✓		
369	sprei / alas kasur		1	Unit	2023	APBD	✓		
370	Rak arsip		1	Unit	2023	APBD	✓		
371	Rak arsip		1	Unit	2023	APBD	✓		
372	Rak arsip		1	Unit	2023	APBD	✓		
373	Rak arsip		1	Unit	2023	APBD	✓		
374	Rak arsip		1	Unit	2023	APBD	✓		
375	Rak arsip		1	Unit	2023	APBD	✓		
376	Rak arsip		1	Unit	2023	APBD	✓		
377	Rak arsip		1	Unit	2023	APBD	✓		
378	Rak arsip		1	Unit	2023	APBD	✓		
379	Rak arsip		1	Unit	2023	APBD	✓		
380	Rak arsip		1	Unit	2023	APBD	✓		
381	Rak arsip		1	Unit	2023	APBD	✓		
382	Rak arsip		1	Unit	2023	APBD	✓		
383	Rak arsip		1	Unit	2023	APBD	✓		
384	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
385	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
386	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
387	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
388	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
389	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
390	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kuantitas	Satuan	Tahun Pembelian	Sumber Dana	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8	7	10
391	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
392	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
393	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
394	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
395	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
396	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
397	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
398	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
399	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
400	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
401	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
402	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
403	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
404	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
405	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
406	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
407	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
408	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
409	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
410	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
411	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
412	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
413	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
414	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
415	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
416	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
417	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
418	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
419	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
420	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
421	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
422	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
423	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
424	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
425	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
426	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
427	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
428	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
429	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
430	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kuantitas	Satuan	Tahun Pembelian	Sumber Dana	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8	7	10
431	kursi kerja		1	Unit	2023	APBD	✓		
432	Perlengkapan TV		1	Unit	2023	APBD	✓		
433	Perlengkapan TV		1	Unit	2023	APBD	✓		
434	Perlengkapan TV		1	Unit	2023	APBD	✓		
435	Perlengkapan TV		1	Unit	2023	APBD	✓		
436	Perlengkapan TV		1	Unit	2023	APBD	✓		
437	AC 1 PK	POLYTRON	1	Unit	2023	APBD	✓		
438	AC 2 PK	POLYTRON	1	Unit	2023	APBD	✓		
439	Mesin absen	SOLUTION	1	Unit	2023	APBD	✓		
440	Rak sound system		1	Unit	2023	APBD	✓		
441	Infocus	DELL	1	Unit	2023	APBD	✓		
442	Infocus		1	Unit	2023	APBD	✓		
443	Infocus		1	Unit	2023	APBD	✓		
444	Infocus		1	Unit	2023	APBD	✓		
445	Infocus		1	Unit	2023	APBD	✓		
446	Tempat sampah pilah		1	Unit	2023	APBD	✓		
447	Tempat sampah pilah		1	Unit	2023		✓		
448	Tempat sampah pilah		1	Unit	2023		✓		
449	Tempat sampah pilah		1	Unit	2023		✓		
450	Tempat sampah pilah		1	Unit	2023		✓		
451	Tempat sampah pilah		1	Unit	2023		✓		
452	Tempat sampah pilah		1	Unit	2023		✓		
453	Baju safety APD		1	Unit	2023		✓		
454	Baju safety APD		1	Unit	2023		✓		
455	Baju safety APD		1	Unit	2023		✓		
456	Tirai klinik kesehatan		1	Unit	2023		✓		
457	kursi kerja		1	Unit	2024	APBD	✓		
458	kursi kerja		1	Unit	2024	APBD	✓		
459	kursi kerja		1	Unit	2024	APBD	✓		
460	kursi kerja		1	Unit	2024	APBD	✓		
461	kursi kerja		1	Unit	2024	APBD	✓		
462	kursi kerja		1	Unit	2024	APBD	✓		
463	kursi kerja		1	Unit	2024	APBD	✓		
464	kursi kerja		1	Unit	2024	APBD	✓		
465	kursi kerja		1	Unit	2024	APBD	✓		
466	Box container 150 Liter	SHINPO	1	Unit	2024	APBD	✓		
467	Box container 150 Liter	SHINPO	1	Unit	2024	APBD	✓		
468	Box container 150 Liter	SHINPO	1	Unit	2024	APBD	✓		
469	Box container 150 Liter	SHINPO	1	Unit	2024	APBD	✓		
470	Box container 150 Liter	SHINPO	1	Unit	2024	APBD	✓		

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kuantitas	Satuan	Tahun Pembelian	Sumber Dana	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8	7	10
471	Box container 150 Liter	SHINPO	1	Unit	2024	APBD	✓		
472	Box container 150 Liter	SHINPO	1	Unit	2024	APBD	✓		
473	Box container 150 Liter	SHINPO	1	Unit	2024	APBD	✓		
474	Box container 150 Liter	SHINPO	1	Unit	2024	APBD	✓		
475	Box container 150 Liter	SHINPO	1	Unit	2024	APBD	✓		
476	TV	LG	1	Unit	2024	APBD	✓		
477	TV	LG	1	Unit	2024	APBD	✓		
478	Standing TV	Fahreinheit	1	Unit	2024	APBD	✓		
479	Standing TV	Fahreinheit	1	Unit	2024	APBD	✓		
480	Mesin antrian		1	Unit	2024	APBD	✓		
481	Papan informasi		1	Unit	2024	APBD	✓		
482	Papan merk huruf timbul		1	Unit	2024	APBD	✓		
483	Portable AC / AC Stand	Polytron	1	Unit	2024	APBD	✓		
484	Portable AC / AC Stand	BestLife	1	Unit	2024	APBD	✓		

Sumber : LKPD Audited Tahun 2024 Dinsos Kota Jambi Tahun 2025

Tabel. 8

DAFTAR ALAT-ALAT STUDIO, ALAT-ALAT KOMUNIKASI DAN PEMANCAR, ALAT-ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN, ALAT-ALAT KOMPUTER , ALAT OLAHRAGA
 Menurut Jenis Golongan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Sosial Kota Jambi
 Periode s/d Desember Tahun 2024

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kuantitas	Satuan	Tahun Pembelian	Sumber Dana	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8	7	10
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR								
1	Televisi		1	Unit	2006	APBD TA. 2006			✓
2	Televisi	Sanyo	1	Unit	2008	APBD TA. 2008	✓		
3	Toa jinjing	Sony	1	Unit	2009	APBD TA. 2009			✓
4	TV	LG	1	Unit	2011	APBD TA. 2011			✓
5	kamera digital	canon	1	Unit	2012	APBD TA. 2012			✓
6	Kamera	Canon	1	Unit	2012	APBD TA. 2012			✓
8	Speaker Aktif	MK Acoustic	1	Unit	2013	APBD TA. 2013			✓

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kuantitas	Satuan	Tahun Pembelian	Sumber Dana	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8	7	10
9	Speaker	TOA	1	Unit	2013	APBD TA 2013			✓
10	Speaker	TOA	1	Unit	2013	APBD TA 2013			✓
11	Tape DVD	Compo LG	1	Unit	2013	APBD TA 2013			✓
12	Kamera digital	SONNY DSC-W620	1	Unit	2013	APBD			✓
33	Handy Talkie	Firstcon	1	Unit	2013	APBD TA 2013			
34	Handy Talkie	Firstcon	1	Unit	2013	APBD TA 2013			
35	Handy Talkie	Firstcon	1	Unit	2013	APBD TA 2013			
13	Televisi + Boster + Antena	LG TANAKA PF Goceng	1	Unit	2014	APBD	✓		
14	Proyektor + Layar Infocus	BENQ	1	Unit	2014	APBD	✓		
15	Amplifier	TOA	1	Unit	2014	APBD			
16	Camera Digital	Cannon EOS 60D	1	Unit	2015	APBD	✓		
17	Mic	Shure FGX8	1	Unit	2015	APBD			
18	Mic	Shure FGX8	1	Unit	2015	APBD			
36	Wireles mic	HDT-2088USB	1	Unit	2015	APBD			
19	Televisi Layar Datar	Sharp	1	Unit	2016	APBD	✓		
20	Televisi Layar Datar	Sharp	1	Unit	2016	APBD			
21	Televisi Layar Datar	Sharp	1	Unit	2016	APBD	✓		
23	Kamera DSLR	Canon	1	Unit	2018	APBD	✓		
24	Sound System	Saparo	1	Unit	2018	APBD			
25	Sound System	Saparo	1	Unit	2019	APBD			
26	TV LED untuk CCTV Aqua 32 Inch		1	Unit	2020	Biaya Tidak Terduga	✓		
27	TV Led Samsung 32 N 4001		1	Unit	2020	Biaya Tidak Terduga	✓		
28	TV Led Samsung 40 N 5000		1	Unit	2020	Biaya Tidak Terduga	✓		
29	TV LED Ichiko 32 Inch		1	Unit	2020	Biaya Tidak Terduga			
30	CCTV	HIKVISION Turbo HD 1080p	1	Unit	2021	APBD	✓		
31	Infocus	Viewsonic	1	Unit	2021	APBD	✓		
32	Sound system	Local	1	Unit	2021	APBD			
37	infocus	Acer	1	Unit	2022	APBD	✓		
38	Sound System	Baretone Max	1	Unit	2022	APBD			
39	Sound Portable	Baretone Max	1	Unit	2022	APBD			
40	Speaker wireless portable	Baretone Max	1	Unit	2023	APBD	✓		
41	Speaker wireless portable	Baretone Max	1	Unit	2023	APBD	✓		
42	Infocus	DELL	1	Unit	2023	APBD	✓		
43	Infocus	DELL	1	Unit	2023	APBD	✓		
44	Infocus	DELL	1	Unit	2023	APBD	✓		
45	Infocus	DELL	1	Unit	2023	APBD	✓		

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kuantitas	Satuan	Tahun Pembelian	Sumber Dana	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8	7	10
46	Infocus	DELL	1	Unit	2023	APBD	✓		
47	Standing TV	Fahrenheit	1	Unit	2024	APBD	✓		
48	Standing TV	Fahrenheit	1	Unit	2024	APBD	✓		
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		1	Unit					
1	Peralatan kesehatan mobil ambulance		1	Unit	2023	APBD	✓		
2	Emergency kit		1	Unit	2023	APBD	✓		
3	Oxymeter		1	Unit	2023	APBD	✓		
4	Oxymeter		1	Unit	2023	APBD	✓		
5	Tensi meter		1	Unit	2023	APBD	✓		
6	Timbangan tinggi badan dan berat		1	Unit	2023	APBD	✓		
7	alat tes darah portable (glucometer with glucostic)		1	Unit	2023	APBD	✓		
8	alat tes darah portable (glucometer with glucostic)		1	Unit	2023	APBD	✓		
	KOMPUTER		1	Unit					
1	Computer	LG	1	Unit	2009	APBD			
2	Laptop	Toshiba	1	Unit	2010	APBD	✓		
3	Laptop	Acer	1	Unit	2010	APBD	✓		
4	Komputer jaringan		1	Unit	2011	APBD			✓
5	NoteBook/ Laptop	Toshiba	1	Unit	2011	APBD			✓
6	meja kerja		1	Unit	2012	APBD	✓		
7	Laptop	DELL	1	Unit	2013	APBD			✓
8	Laptop	DELL N5420 13-2370 M	1	Unit	2013	APBD			✓
9	Laptop	DELL N5420 13-2370 M	1	Unit	2013	APBD			✓
10	Laptop	DELL N5420 13-2370 M	1	Unit	2013	APBD			✓
11	Laptop	DELL N5420 13-2370 M	1	Unit	2013	APBD	✓		
12	Notebook	ACCER One A0725	1	Unit	2013	APBD			✓
13	Notebook	ACCER One A0725	1	Unit	2013	APBD			✓
14	Notebook	ACCER One A0725	1	Unit	2013	APBD			✓
15	Notebook	ACCER One A0725	1	Unit	2013	APBD			✓
16	Notebook	ACCER One A0725	1	Unit	2013	APBD			
17	Notebook	ACCER One A0725	1	Unit	2013	APBD			
18	Notebook	ACCER One A0725	1	Unit	2013	APBD			
19	Printer laser jet	BROTHER	1	Unit	2013	APBD			
20	Printer INK jet	EPSON L110	1	Unit	2013	APBD			✓

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kuantitas	Satuan	Tahun Pembelian	Sumber Dana	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8	7	10
21	Printer INK jet	EPSON L110	1	Unit	2013	APBD			
22	Printer INK jet	EPSON L110	1	Unit	2013	APBD			
23	Printer	EPSON L 100	1	Unit	2013	APBD			
24	Printer	EPSON L 100	1	Unit	2013	APBD			
25	Printer	EPSON L 100	1	Unit	2013	APBD			
26	Printer	EPSON L 100	1	Unit	2013	APBD			
27	Printer	EPSON L 100	1	Unit	2013	APBD			
28	Printer	EPSON L 100	1	Unit	2013	APBD			
29	Printer	EPSON L 100	1	Unit	2013	APBD			
30	Printer	LASER JET Multifungsi	1	Unit	2013	APBD			
31	Printer	Epson	1	Unit	2014	APBD	✓		
32	Printer	Epson	1	Unit	2014	APBD	✓		
33	Printer	Epson	1	Unit	2014	APBD			
34	Printer	Epson	1	Unit	2014	APBD			
35	NOTEBOOK	ASUS	1	Unit	2014	APBD	✓		
36	NOTEBOOK	ASUS	1	Unit	2014	APBD			
37	Laptop	ASUS	1	Unit	2014	APBD			
38	Komputer PC	DELL	1	Unit	2014	APBD			
39	Komputer PC	Acer	1	Unit	2015	APBD			
40	Laptop	Toshiba	1	Unit	2015	APBD			
41	Laptop	Toshiba	1	Unit	2015	APBD			
42	Hardisk Eksternal	Toshiba	1	Unit	2015	APBD			
43	Hardisk Eksternal	Toshiba	1	Unit	2015	APBD			
44	Hardisk Eksternal	Toshiba	1	Unit	2015	APBD			
45	Hardisk Eksternal	Toshiba	1	Unit	2015	APBD			
46	Printer INK Jet	Cannon Pixma E510	1	Unit	2015	APBD	✓		
47	Printer INK Jet	Cannon Pixma E510	1	Unit	2015	APBD			✓
48	Printer INK Jet	Cannon Pixma E510	1	Unit	2015	APBD			
49	Printer Besar	Brother MFC-J3720	1	Unit	2015	APBD			
50	Printer	Epson	1	Unit	2016	APBD	✓		
51	Komputer/PC	Acer	1	Unit	2016	APBD			✓
52	Laptop	Asus/X441UA-WX099T/HDD 500 GB/intel	1	Unit	2017	APBD			✓
53	Laptop	Asus/X441UA-WX099T/HDD 500 GB/intel	1	Unit	2017	APBD			
54	Laptop	Asus/X441UA-WX099T/HDD 500 GB/intel	1	Unit	2017	APBD			
55	Komputer/PC	Asus/Intel i3 Series Corc TM13-7100U Memori 4 GB DDR4	1	Unit	2018	APBD	✓		

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kuantitas	Satuan	Tahun Pembelian	Sumber Dana	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8	7	10
56	Komputer/PC	Asus/Intel i3 Series Corc TM13-7100U Memori 4 GB DDR5	1	Unit	2018	APBD	✓		
57	Komputer/PC	Asus/Intel i3 Series Corc TM13-7100U Memori 4 GB DDR6	1	Unit	2018	APBD	✓		
58	Komputer/PC	Asus/Intel i3 Series Corc TM13-7100U Memori 4 GB DDR7	1	Unit	2018	APBD	✓		
59	Komputer/PC	Asus/Intel i3 Series Corc TM13-7100U Memori 4 GB DDR8	1	Unit	2018	APBD			
60	Printer	Epson/Inkjet Printer/L 360	1	Unit	2018	APBD	✓		
61	Printer	Epson/Inkjet Printer/L 360	1	Unit	2018	APBD			✓
62	Printer	Epson/Inkjet Printer/L 360	1	Unit	2018	APBD	✓		
63	Printer	Epson/Inkjet Printer/L 360	1	Unit	2018	APBD	✓		
64	Printer	Epson/Inkjet Printer/L 360	1	Unit	2018	APBD			
65	Printer	Epson/Inkjet Printer/L 565	1	Unit	2019	APBD	✓		
66	Printer	Epson/Inkjet Printer/L 565	1	Unit	2019	APBD			✓
67	Printer	Epson/Printher Inkjet L120	1	Unit	2019	APBD			
68	Komputer/PC	Asus/Intel i3 Series Corc i3-6006U Memori 4 GB DDR4 HDD 500 GB	1	Unit	2019	APBD	✓		
69	Komputer/PC	Asus/Intel i3 Series Corc i3-6006U Memori 4 GB DDR4 HDD 500 GB	1	Unit	2019	APBD			✓
70	Komputer/PC	Lenovo A340-221WL (F0EB000QID) ODD:DVDRW Prosesor: IntelCore i3-8145U Ram 4 GB DDR	1	Unit	2019	APBD	✓		
71	Tablet	Advan	1	Unit	2020	APBD	✓		
72	Tablet	Advan	1	Unit	2020	APBD	✓		
73	Tablet	Advan	1	Unit	2020	APBD	✓		
74	Laptop	Lenovo	1	Unit	2020	APBD	✓		
75	Laptop	Lenovo	1	Unit	2020	APBD	✓		
76	Laptop	Lenovo	1	Unit	2020	APBD	✓		
77	Komputer/PC	Assus	1	Unit	2020	APBD	✓		
78	Komputer/PC	Assus	1	Unit	2020	APBD	✓		
79	Komputer/PC	Assus	1	Unit	2020	APBD			
80	Komputer/PC	Assus	1	Unit	2020	APBD			

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kuantitas	Satuan	Tahun Pembelian	Sumber Dana	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8	7	10
81	Printer	Epson	1	Unit	2020	APBD	✓		
82	Printer	Epson	1	Unit	2020	APBD			
83	Printer	Epson	1	Unit	2020	APBD	✓		
84	Printer	Epson	1	Unit	2020	APBD	✓		
85	Speaker Wireless Lexus III		1	Unit	2020	BTT			
86	Komputer PC	HP 200 Pro G4 22 All in one PC- Processor	1	Unit	2021	APBD	✓		
87	Printer	Epson All in one wifi A3	1	Unit	2021	APBD			
88	Komputer PC	Lenovo	1	Unit	2022	APBD	✓		
89	Komputer PC	Lenovo	1	Unit	2022	APBD	✓		
90	Komputer PC	Lenovo	1	Unit	2022	APBD	✓		
91	Komputer PC	Lenovo	1	Unit	2022	APBD	✓		
92	Komputer PC	Lenovo	1	Unit	2022	APBD	✓		
93	Tablet Android	Samsung	1	Unit	2022	APBD	✓		
94	Tablet Android	Samsung	1	Unit	2022	APBD	✓		
95	Tablet Android	Samsung	1	Unit	2022	APBD	✓		
96	Tablet Android	Samsung	1	Unit	2022	APBD	✓		
97	Tablet Android	Samsung	1	Unit	2022	APBD	✓		
98	Tablet Android	Samsung	1	Unit	2022	APBD	✓		
99	Tablet Android	Samsung	1	Unit	2022	APBD	✓		
100	Tablet Android	Samsung	1	Unit	2022	APBD	✓		
101	Tablet Android	Samsung	1	Unit	2022	APBD	✓		
102	Tablet Android	Samsung	1	Unit	2022	APBD	✓		
103	Tablet Android	Samsung	1	Unit	2022	APBD	✓		
104	Tablet Android	Samsung	1	Unit	2022	APBD	✓		
105	Tablet Android	Samsung	1	Unit	2022	APBD	✓		
106	Tablet Android	Samsung	1	Unit	2022	APBD	✓		
107	Tablet Android	Samsung	1	Unit	2022	APBD	✓		
108	Tablet Android	Samsung	1	Unit	2022	APBD	✓		
109	Tablet Android	Samsung	1	Unit	2022	APBD	✓		
110	Tablet Android	Samsung	1	Unit	2022	APBD	✓		
111	Tablet Android	Samsung	1	Unit	2022	APBD	✓		
112	Tablet Android	Samsung	1	Unit	2022	APBD	✓		
113	Layar Projector		1	Unit	2022	APBD	✓		
114	Scanner	EPSON	1	Unit	2023	APBD	✓		
115	Harddisk eksternal	SEAGATE	1	Unit	2023	APBD	✓		
116	Komputer PC	ADVAN	1	Unit	2023	APBD	✓		
117	Komputer PC	ADVAN	1	Unit	2023	APBD	✓		
118	Komputer PC	ADVAN	1	Unit	2023	APBD	✓		

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kuantitas	Satuan	Tahun Pembelian	Sumber Dana	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8	7	10
119	PC AIO 13	ADVAN	1	Unit	2023	APBD	✓		
120	Printer AIO	EPSON	1	Unit	2023	APBD	✓		
121	Printer AIO	EPSON	1	Unit	2023	APBD	✓		
122	Printer AIO	EPSON	1	Unit	2023	APBD	✓		
123	Printer AIO	EPSON	1	Unit	2023	APBD	✓		
124	Laptop	AXIOO	1	Unit	2023	APBD	✓		
125	Laptop	AXIOO	1	Unit	2023	APBD	✓		
126	Komputer PC	PC ALL in One	1	Unit	2023	APBD	✓		
127	Printer	EPSON	1	Unit	2023	APBD	✓		
128	Printer	EPSON	1	Unit	2023	APBD	✓		
129	Printer	EPSON	1	Unit	2023	APBD	✓		
130	Komputer PC	PC ALL in One	1	Unit	2023	APBD	✓		
131	Printer	EPSON	1	Unit	2023	APBD	✓		
132	Harddisk eksternal	SEAGATE	1	Unit	2024	APBD	✓		
133	Harddisk eksternal	SEAGATE	1	Unit	2024	APBD	✓		
134	Harddisk eksternal	SEAGATE	1	Unit	2024	APBD	✓		
135	Printer	EPSON L3210	1	Unit	2024	APBD	✓		
136	Printer	EPSON L3210	1	Unit	2024	APBD	✓		
137	Printer	EPSON L3210	1	Unit	2024	APBD	✓		
138	Komputer PC	ACER Veriton Z4 AIO	1	Unit	2024	APBD	✓		
139	Komputer PC	ACER Veriton Z4 AIO	1	Unit	2024	APBD	✓		
140	Komputer PC	ACER Veriton Z4 AIO	1	Unit	2024	APBD	✓		
141	Laptop	ACER TravelMate Core i5	1	Unit	2024	APBD	✓		
142	Laptop	ACER TravelMate Core i5	1	Unit	2024	APBD	✓		
143	Laptop	ACER TravelMate Core i5	1	Unit	2024	APBD	✓		
144	Laptop	ACER TravelMate Core i5	1	Unit	2024	APBD	✓		
145	Laptop	Asus ExpertBook	1	Unit	2024	APBD	✓		
	PERALATAN OLAH RAGA		1	Unit					
1	Meja Pingpong	SUPA 302	1	Unit	2021	APBD	✓		
2	Meja Pingpong	SUPA 302	1	Unit	2021	APBD	✓		
3	Meja Pingpong	SUPA 302	1	Unit	2021	APBD	✓		

Sumber : LKPD Audited Tahun 2024 Dinsos Kota Jambi Tahun 2025

Tabel. 9

DAFTAR PENGADAAN GEDUNG & BANGUNAN, JALAN IRIGASI & JARINGAN
Menurut Jenis Golongan Aset Tetap pada Dinas Sosial Kota Jambi
Periode s/d Desember Tahun 2024

No	URAIAN JENIS ASET	Merk / Tipe / Spesifikasi	Kuantitas	Satuan Ukuran	Sumber Dana (APBD / APBN)	Tahun	Kondisi (Baik/ Rusak/ Rusak Berat)
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	PENGADAAN GEDUNG & BANGUNAN						
1.	Interior	Ruang Kadis	1	Unit	APBD	2022	Baik
2.	Interior	Ruang Pelayanan	1	Unit	APBD	2021	Baik
3.	Pos satpam	Konstruksi Beton	1	Unit	APBD	2021	Baik
4.	Gedung PPKS Lantai 2	Konstruksi Beton	1	Unit	APBD	2017	Baik
5.	Gedung PPKS Lantai 1	Konstruksi Beton	1	Unit	APBD	2016	Baik
6.	Tempat Parkir Kendaraan Roda 4	Konstruksi Beton	1	Unit	APBD	2013	Baik
7.	Gudang Bansos 2 Lantai	Konstruksi Beton	1	Unit	APBD	2011	Baik
8.	Pagar Kantor	Konstruksi Beton	1	Unit	APBD	2011	Baik
9	Gudang Bansos	Konstruksi Beton	1	Unit	APBD	2009	Baik
10.	Gedung DWP	Konstruksi Beton	1	Unit	APBD	2009	Baik
11.	Gedung LK3	Konstruksi Beton	1	Unit	APBD	2009	Baik
12.	Tempat Parkir Kendaraan Roda 4	Konstruksi Beton	1	Unit	APBD	2004	Baik
13.	Gedung Aula	Konstruksi Beton	1	Unit	APBN	2002	Baik
14.	Gedung Bina Latihan Kerja	Konstruksi Beton	1	Unit	APBN	2002	Rusak Ringan
15.	Gedung Ruang Bidang PTKHI	Konstruksi Beton	1	Unit	APBD	2001	Baik
16.	Gedung Sekretariat	Konstruksi Beton	1	Unit	APBD	1998	Baik
17.	Gedung Kantor	Konstruksi Beton	1	Unit	APBD	1998	Rusak Berat
B.	JALAN IRIGASI & JARINGAN						
1.	Daya Instalasi & Jaringan Listrik	Konstruks & Jasa	23.000	Watt	APBD	2010	Baik
2.	Daya Instalasi & Jaringan Listrik	Konstruksi & Jasa	3.300	Watt	APBD	2013	Baik

Sumber : LKPD Audited Tahun 2024 Dinsos Kota Jambi Tahun 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial merupakan salah satu pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota Jambi. Pelayanan di Dinas Sosial Kota Jambi merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Walidata dan Produsen Data Bidang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 103/HUK/2025 tentang Kelompok Sasaran Kerja Kementerian Sosial.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Layanan Operasional dan Layanan Dukungan Administrasi PAS yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Jambi sebagai berikut :

SASARAN PAS (PEMERLU ATENSI SOSIAL)	DUKUNGAN ADMINISTRASI	JENIS LAYANAN OPERASIONAL
Anak Rentan, Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Gelandangan, Pengemis dan Pemulung (Mereka yang Berpendapatan Rendah)	Rekomendasi Layanan Rehabilitasi sosial bagi PPKS	Pelayanan kedaruratan
		Pelayanan reunifikasi keluarga
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
		Layanan data dan pengaduan
		Pelayanan penelusuran
		Layanan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal
		Pemenuhan kebutuhan sandang
		Layanan rujukan
		Layanan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (Anak Rentan)
		Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara (Anak Rentan)
		Anak-Anak Terlantar yang dijangkau (Anak Rentan)
		Anak-anak terlantar yang mendapat rujukan (Anak Rentan)
		Layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial (ABH)
	Rekomendasi Layanan Kesehatan, Rekomendasi Layanan Program Pendidikan bagi warga miskin	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
	Rekomendasi Layanan Kesehatan	Pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
	Rekomendasi Kelayakan penerima bantuan sosial	Rekomendasi Kelayakan penerima bantuan sosial
	Surat Keterangan Pemberdayaan dan Pelatihan Kemandirian Ekonomi	Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Penyandang Disabilitas)
	Rekomendasi Calon Orang Tua Asuh (COTA)	Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi (Anak Rentan)

SASARAN PAS (PEMERLU ATENSI SOSIAL)	DUKUNGAN ADMINISTRASI	JENIS LAYANAN OPERASIONAL
Warga Binaan	Rekomendasi Layanan Rehabilitasi sosial bagi PPKS	Pelayanan kedaruratan
Korban Kekerasan	Rekomendasi Layanan Rehabilitasi sosial bagi PPKS	Pelayanan reunifikasi keluarga
Korban Napza dan HIV/AIDS	Rekomendasi Layanan Kesehatan, Rekomendasi Layanan Program Pendidikan bagi warga miskin	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Mereka yang bermasalah Sosial	Rekomendasi Layanan Rehabilitasi sosial bagi PPKS	Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
Perempuan Rentan	Rekomendasi Layanan Rehabilitasi sosial bagi PPKS	Layanan data dan pengaduan
		Pelayanan penelusuran
		Layanan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal
		Pemenuhan kebutuhan sandang
		Layanan rujukan
		Layanan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial
Fakir Miskin	Rekomendasi Layanan Kesehatan	Pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
	Surat Keterangan Pemberdayaan dan Pelatihan Kemandirian Ekonomi	Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Korban Binaan, Korban Kekerasan, Korban Napza dan HIV/AIDS)
	Surat Keterangan Pemberdayaan dan Pelatihan Kemandirian Ekonomi	Keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah
	Rekomendasi Kelayakan penerima bantuan sosial	Orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi
Fakir Miskin	Rekomendasi Kelayakan penerima bantuan sosial	Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
	Surat Keterangan Kepesertaan PKH, Layanan Informasi DTKS/DTSN	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

SASARAN PAS (PEMERLU ATENSI SOSIAL)	DUKUNGAN ADMINISTRASI	JENIS LAYANAN OPERASIONAL
Korban Bencana	Rekomendasi Kelayakan penerima bantuan sosial	Fasilitasi tempat penampungan pengungsi
	Rekomendasi Kelayakan penerima bantuan sosial , Rekomendasi Layanan Rehabilitasi sosial bagi PPKS	Pemenuhan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana
		Layanan dukungan Psikososial
		Penanganan khusus bagi Kelompok rentan
		Permakanan dalam masa tanggap darurat
	Rekomendasi Santunan Kematian Akibat bencana alam/Non Alam/Sosial	Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai
	Rekomendasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial	Kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi
		Tempat penampungan pengungsi yang tersedia
		Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial
		Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan
Kepahlawanan	Rekomendasi Kelayakan penerima bantuan sosial	Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial
		Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

SASARAN PAS (PEMERLU ATENSI SOSIAL)	DUKUNGAN ADMINISTRASI	JENIS LAYANAN OPERASIONAL
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Rekomendasi Pengajuan/Perpanjangan/Legalisir Surat Tanda Pendaftaran LKS	Lembaga Kesejahteraan Sosial
	Rekomendasi Pembentukan LK3	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
	Rekomendasi izin Pengumpulan Uang/Barang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah
		Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
		Pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan sosial
		Pekerja Sosial Masyarakat
		Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
		Pekerja sosial profesional yang memberikan bimbingan sosial
		Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
		Taruna Siaga Bencana
		Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga
		Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
		Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi
		Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Bimbingan Teknis
		Peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya
		Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial
		Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
		Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi
		Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya

Dinas Sosial Kota Jambi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah adalah instansi yang diberi kewenangan secara teknis untuk menangani dan mengelola bidang Sosial juga sebagai salah satu fungsi pelayanan kepada masyarakat di Kota Jambi. Dari program dan kegiatan yang telah dilakukan di bidang sosial dapat disimpulkan indikator keberhasilan dalam rangka peningkatan penanganan dan pelayanan Masalah-Masalah Sosial antara lain :

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- 2) Meningkatnya pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya.
- 3) Meningkatnya kualitas hidup bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai-nilai sosial budaya bangsa
- 4) Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial
- 5) Meningkatnya pelayanan bagi korban bencana
- 6) Meningkatnya prakarsa dan peran aktif masyarakat melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terdiri dari Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Tagana, TKSK, PSM, Pendamping PKH, Karang Taruna, LK3, termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan Orsos/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.

Indonesia adalah sebuah negara di mana Konstitusi negara yakni UUD 1945 mewajibkan pemerintah membangun sebuah sistem kesejahteraan yang universal. Tetapi berdasarkan pengalaman negara- negara maju yang menganut ideologi 'negara kesejahteraan' atau '*welfare state*', menyerahkan sepenuhnya kepada Negara untuk urusan sosial security system bagi seluruh warga Negara lama-kelamaan membebani keuangan Negara dan Masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial pada level individu, keluarga atau komunitas/masyarakat. Dari berbagai sudut pandang dan ukuran apapun, pelayanan sosial bagi PAS yang dilakukan oleh keluarga dan komunitas/masyarakat

adalah yang paling murah biayanya. Oleh karena itu, potensi dan sumber kesejahteraan sosial dimaksud sebagaimana telah diidentifikasi selama ini perlu terus digali dikembangkan dan didayagunakan oleh pelaku pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Potensi dan sumber kesejahteraan sosial memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan pada OPD Dinas Sosial Kota Jambi. Integritas dan kompetensi sumber Potensi dan sumber kesejahteraan sosial merupakan potensi utama dalam menjawab tuntutan pembangunan dan kualitas permasalahan kesejahteraan sosial dan Ketenagakerjaan, maka perlu adanya kemampuan dalam menggerakkan sumber daya dimaksud.

Oleh sebab itu Pemerlu Atensi Sosial (PAS) yang dapat digunakan dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Apabila dapat digali dan dikembangkan, maka PAS ini dapat mendukung secara berkelanjutan penyelenggaraan kesejahteraan sosial,

Adapun Pemerlu Atensi Sosial (PAS) yang keberadaannya sangat diharapkan secara fungsional mampu berada pada barisan terdepan di tengah masyarakat untuk dapat membantu melakukan sinkronisasi, keterpaduan, dan koordinasi program pembangunan untuk menyelesaikan masalah sosial dimaksud diuraikan di bawah ini :

- 1) Sumber Daya Manusia Pembangunan Kesejahteraan Sosial, yang mencakup antara lain :
 - a) Tenaga kesejahteraan sosial,
 - b) Pekerja sosial profesional,
 - c) Relawan sosial, dan
 - d) Penyuluh sosial
- 2) Pilar Partisipan Usaha Kesejahteraan Sosial yang mencakup antara lain:
 - a) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
 - b) Koordinator Kota dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
 - c) Karang Taruna (KT)
 - d) Taruna Siaga Bencana (Tagana)
 - e) Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
 - f) Fasilitator Kelurahan (Faskel)
 - g) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
 - h) Pendamping Rehsos

- 3) Sarana dan Prasarana Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang mencakup antara lain :
 - a) Rumah Singgah PAS;
 - b) Panti Sosial;
 - c) Panti Rehabilitasi Sosial;
 - d) Rumah Aman DPMPPA;
 - e) Sentra Alyatama
- 4) Legislasi Kesejahteraan Sosial

Dalam menjalankan program pembangunan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kota Jambi memiliki payung hukum sebagaimana dituangkan dalam :

 - a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - b) Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
 - d) Permensos Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial
 - e) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas
 - f) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2020 yang juga mengatur tentang penanggulangan kemiskinan
- 5) Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha

Pembangunan kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya Dinas Sosial Kota Jambi, namun juga tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha. Partisipasi dunia usaha dilakukan melalui program *corporate social responsibility* (CSR) yaitu program yang mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan dan pelayanan kesejahteraan sosial.
- 6) Manajemen Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Program pengembangan manajemen kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas manajemen dan profesionalisme lembaga pelayanan kesejahteraan sosial melalui penelitian masalah sosial dan pengembangan alternatif-alternatif intervensi pekerjaan sosial, penataan sistem dan mekanisme kelembagaan, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

7) Nilai Kesetiakawanan Sosial

Kesetiakawanan sosial atau rasa solidaritas sosial merupakan potensi spiritual, komitmen bersama sekaligus jati diri bangsa. Oleh karena itu, kesetiakawanan sosial merupakan nurani bangsa Indonesia yang tereplikasi dari sikap dan perilaku yang dilandasi pengertian, kesadaran, keyakinan, tanggung jawab, dan partisipasi sosial sesuai dengan kemampuan dari masing-masing warga dengan semangat kebersamaan, kerelaan untuk berkorban demi sesama, kegotongroyongan dalam kebersamaan dan kekeluargaan.

Nilai kesetiakawanan sosial tercermin dari sikap mental yang dimiliki seseorang atau suatu komunitas, peka terhadap lingkungan sosialnya sehingga mendorong untuk peduli melakukan perbuatan bagi kepentingan lingkungan sosialnya tersebut.

Esensi kesetiakawanan sosial adalah memberikan yang terbaik bagi orang lain. Tak terkecuali bagi organisasi, lembaga publik dan dunia usaha yang dalam gerak kegiatannya membutuhkan dukungan dari masyarakat. Nilai kesetiakawanan sosial solidaritas sosial, dan kearifan lokal merupakan potensi dan kekuatan Dinas Sosial Kota Jambi dalam menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial.

Beberapa persoalan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Jambi yang dapat menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja pada masa yang akan mendatang jika tidak segera diberi perhatian seperti konstelasi faktor internal organisasi Dinas Sosial Kota Jambi.

Berdasarkan uraian di atas, inti permasalahan di Bidang Sosial yang sedang dan masih akan dihadapi dalam jangka waktu 2025 - 2029 mendatang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1) Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan

sosial lainnya seperti ketunaan sosial, Disabilitas, Keterlantaran, ketertinggalan/keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan. Rendahnya tingkat capaian penurunan angka kemiskinan sebagai akibat:

- a) Kejadian bencana alam (banjir, Kebakaran, Angin Puting Beliung, Tanah Longsor dsb)
- b) Terjadinya krisis ekonomi global, Kenaikan Harga BBM, tingginya kurs nilai tukar dolar terhadap mata uang rupiah yang berdampak terhadap tingginya harga keperluan pada berbagai sektor dan memicu kenaikan harga pada sektor lainnya;
- c) Jumlah PAS yang dikategorikan sebagai fakir miskin termasuk kategori kemiskinan
- d) Jumlah keluarga fakir miskin akan semakin bertambah mengingat masih adanya kelompok masyarakat yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Rentan (KR).

Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan antara lain :

- a) Faktor internal :
 - ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari hari,
 - ketidakmampuan dalam menampilkan peranan sosial dan
 - ketidakmampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapinya
 - b) Faktor eksternal :
 - kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin;
 - tidak tersedianya pelayanan sosial dasar;
 - tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah;
 - terbatasnya lapangan pekerjaan;
 - belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan, kesenjangan, dan ketidakadilan sosial;
 - dampak pembangunan yang berorientasi kapitalis.
- 2) Keterlantaran

Keterlantaran di sini dimaksudkan sebagai pengabaian/penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai penyebab. Oleh sebab itu

anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Begitu pula lanjut usia perlu dijaga dan diasuh melalui pelayanan sosial agar kualitas hidup mereka meningkat dan mampu memberi kontribusi dalam kehidupan sosialnya.

Masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah adalah bagaimana meningkatkan pelayanan sosial bagi para lanjut usia agar mereka dapat hidup bahagia dalam suasana aman dan tenteram yang tentu saja melalui usaha pelebagaan para lanjut usia.

No	PPKS Terlantar	Jumlah
1	Disabilitas Terlantar	135 Orang
2	Anak Terlantar	87 Orang
3	Lanjut Usia Terlantar	170 Orang
4	Gelandangan Pengemis	337 Orang
TOTAL		729 Orang

Sumber : Laporan SPM 2024

3) Disabilitas

Disabilitas diartikan sebagai hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormal fungsi struktur anatomi, psikologi, maupun fisiologi seseorang. Disabilitas telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga memengaruhi keleluasan aktivitas fisik, kepercayaan, dan harga diri yang bersangkutan, dalam berhubungan dengan orang lain ataupun dengan lingkungan.

Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat. Sisi lain dari Disabilitas adalah pandangan sebagian orang yang menganggap Disabilitas sebagai kutukan, sehingga mereka perlu disembunyikan oleh keluarganya. Perlakuan seperti ini menyebabkan hak penyandang cacat untuk berkembang dan berkreasi sebagaimana orang-orang yang tidak cacat tidak dapat terpenuhi. Masalah

Disabilitas akan semakin berat bila disertai dengan masalah kemiskinan, Keterlantaran, dan keterasingan.

4) Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku

Ketunaan memberi indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri, dan juga kebutuhan religius, rekreasi, dan pendidikan seseorang. Kegagalan seseorang menjalankan fungsi sosialnya menyebabkan seseorang menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Indonesia saat ini dihadapkan pada tingginya jumlah mereka yang tergolong sebagai PPKS, seperti korban tindak kekerasan terhadap wanita dan orang tua, gelandangan dan pengemis, tunasusila, eks narapidana dan penyalahgunaan NAPZA serta penderita HIV/AIDS.

Sebagai pusat pemerintahan provinsi, pusat perdagangan dan pelayanan jasa, Kota Jambi tumpuan bagi penduduk untuk menggantungkan hidupnya menuju kehidupan yang lebih baik. Pendatang dari luar daerah pun semakin meningkat, hal ini mengakibatkan bertambahnya penduduk kota sekaligus menambah permasalahan sosial yang semakin semakin kompleks. Ke depan permasalahan ini perlu penanganan yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga peran serta masyarakat dan dunia usaha.

Persoalan kemiskinan merupakan bagian tidak bisa terpisahkan sebagai salah satu dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat, memerlukan perhatian ekstra keras dan penuh dengan kesabaran ekstra tinggi. Oleh karena itu pemerintah berada pada posisi kunci sebagai pihak yang harus melakukan pengaturan terhadap distribusi dari hasil sumber- sumber ekonomi.

Kedepan kita akan mengupayakan pengembangan program jaminan sosial oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial seperti perhatian terhadap pekerja sekaligus penyuluh sosial baik dari unsur masyarakat maupun pegawai negeri yang saat ini belum maksimal.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dibidang Sosial Kota Jambi perlu upaya-upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan kebijaksanaan Program operasional dan kegiatan-kegiatan.

Upaya strategis yang akan dilaksanakan dalam pembangunan Sosial tidak

terlepas dari kondisi yang mendukung kegiatan dan faktor-faktor lain dari kegiatan dimaksud. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan OPD Dinas Sosial Jambi yang meliputi :

1. FAKTOR KEKUATAN

- 1) Potensi sumber daya alam yang masih tersedia yang membuka peluang dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui pola pendekatan secara kelompok dalam bentuk KUBE dan peningkatan Usaha Ekonomi Produktif; Keterlibatan dan peran serta aktif Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) ditengah – tengah masyarakat & Lembaga masyarakat yang semakin baik dan bekerja sama dalam menangani masalah kesejahteraan sosial seperti yayasan – yayasan, LSM Orsos dan Karang Taruna sesuai fungsi sosialnya
- 2) Pengelolaan Sumber Daya Personil dalam mendukung dan membantu tugas-tugas pelayanan Kesejahteraan sosial (PKH, Tagana, TKSK, FASKEL, Pendamping Resos)
- 3) Partisipasi dunia usaha dilakukan melalui program *corporate sosial responsibility* (CSR) dan Perluasan Kesempatan Kerja merupakan implementasikan tanggung jawab & kepedulian perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan dan pelayanan kesejahteraan sosial & mengatasi pengangguran
- 4) Tersedianya fasilitas untuk ruang pelayanan.

2. FAKTOR KELEMAHAN

- 1) Keterbatasan APBD Kota Jambi belum optimal menyentuh secara menyeluruh terhadap pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Jambi.
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana kesejahteraan sosial sehingga pelayanan pada masyarakat kurang optimal (Panti, Rumah Singgah, dsbnya);
- 3) Sarana dan prasarana Kantor yang tidak memadai untuk melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- 4) Ketersediaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang belum akurat;
- 5) Kurangnya Pemanfaatan Potensi dan sumber daya pembangunan kesejahteraan sosial ;

Tingkat capaian kinerja Dinas Sosial berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD 2021-2024 Dinas Sosial diperoleh dari capaian kinerja urusan sosial. Capaian kinerja digambarkan pada Tabel T-C.23. Sedangkan untuk capaian realisasi pendanaan digambarkan pada tabel Tabel T-C.24.

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Jambi

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase PPKS Terlantar di Luar Panti yang Tertangani	-	-	-	70	85	80	100	100	80	123.59	100	100	-	1.14	1.45	1.25	1	-
2	Persentase Pelayanan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	1	1	1	1	-
3	Persentase Pelayanan Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu yang menerima Bantuan	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	84.33	-	-	-	-	0.84	-
4	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100																
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		100																

Berdasarkan tabel di atas bahwa pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Jambi telah direalisasikan sesuai dengan target Renstra dan rasio capaian yang sudah sesuai dengan capaian program.

Dari interval yang dicapai tiap tahun dalam kurun waktu 2021-2024 terjadi peningkatan terhadap kinerja pelayanan sehingga rasio capaian mendapatkan angka indeks capaian >1.

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kota Jambi

Uraian	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi anggaran pada tahun ke -				Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke -				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Belanja Operasional	10,009,542,435	18,412,964,502	11,891,068,465	11,117,346,531	9,448,777,466	11,306,845,911	11,205,003,490	10,344,648,483	94.40%	61.41%	94.23%	93.05%	14.01%	3.70%
Belanja Modal	1,211,663,081	586,710,555	498,040,722	273,553,469	1,121,788,250	546,526,800	471,624,455	262,460,000	92.58%	93.15%	94.70%	95.94%	-37.26%	-36.45%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran Dinas Sosial Kota Jambi telah direalisasikan dengan capaian rata-rata belanja operasional dan belanja modal yang pertumbuhannya sudah diatas rata-rata.

Tahun 2024 Dinas Sosial Kota Jambi memperoleh predikat Kategori Sangat Baik pada Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) KemenPAN-RB RI Tahun 2024 dengan Indeks Nilai 4,33. Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024 oleh Ombudsman RI dengan Nilai 92,73 (Zona Hijau, Kualitas Tertinggi) yang diserahkan Januari 2025.

Penilaian Maladminstrasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2025 oleh Ombudsman RI. Dinas Sosial memperoleh Nilai 85,62 dengan kategori Kualitas Pelayanan Baik.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan faktor kekuatan dan kelemahan yang telah dirinci di urusan Sosial diperlukan analisis lingkungan eksternal yang terdiri dari pelayanan OPD Periode 5 (lima) tahun mendatang 2025 - 2029 serta rumusan kebijakan yaitu :

1. Faktor Tantangan

- a) Tingkat kemiskinan penduduk yang relatif tinggi sehingga menimbulkan permasalahan sosial, seperti : Gepeng (gelandangan dan pengemis), fakir miskin, anak terlantar, anak jalanan, disabilitas terlantar, lansia terlantar, Korban Narkoba dan Wanita Tuna Susila (WTS).
- b) Masih kurangnya Partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial SDM bagi penyandang masalah Kesejahteraan Sosial Relatif kurang, mengembangkan diri sangat tergantung pada Bimbingan dan Pembinaan Pemerintah.

2. Faktor Peluang

- a) Undang–Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan dan keleluasan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sistem pemerintah secara optimal.
- b) Keterlibatan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) ditengah–tengah masyarakat untuk dapat mengatasi dan menanggulangi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- c) Potensi sumber daya alam yang masih tersedia yang membuka peluang dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui pola pendekatan

secara kelompok dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pemerlu Atensi Sosial (PAS);

- d) Lembaga masyarakat yang semakin baik dan bekerja sama dalam menangani masalah kesejahteraan sosial seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), LSM orsos, Tagana, Karang Taruna, dan lain sebagainya.
- e) Meningkatnya mobilitas dan informasi masalah kesejahteraan sosial yang dapat meningkatkan kesetiakawanan sosial di masyarakat.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Sebagai pusat pemerintahan provinsi, pusat perdagangan dan pelayanan jasa, Kota Jambi tumpuan bagi penduduk untuk menggantungkan hidupnya menuju kehidupan yang lebih baik. Pendatang dari luar daerah pun semakin meningkat, hal ini mengakibatkan bertambahnya penduduk kota sekaligus menambah permasalahan sosial yang semakin semakin kompleks. Ke depan permasalahan ini perlu penanganan yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga peran serta masyarakat dan dunia usaha.

Persoalan kemiskinan merupakan bagian tidak bisa terpisahkan sebagai salah satu dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat, memerlukan perhatian ekstra keras dan penuh dengan kesabaran ekstra tinggi. Karena itu pemerintah berada pada posisi kunci sebagai pihak yang harus melakukan pengaturan terhadap distribusi dari hasil sumber-sumber ekonomi. Kedepan kita akan mengupayakan pengembangan program jaminan sosial dan bursa kerja oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial seperti perhatian terhadap pekerja sekaligus penyuluh sosial baik dari unsur masyarakat maupun pegawai negeri yang saat ini belum maksimal.

Tantangan kedepan yang akan dihadapi Kota Jambi cukup berat dan hal yang paling pokok adalah berkurangnya dana pembangunan yang mampu disediakan oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah), ketimpangan antar daerah serta inefisiensi di sektor usaha swasta dan pemerintah. Salah satu hal yang paling mendasar di dalam pencapaian solusi tersebut adalah perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).

Dalam hubungannya dengan Fungsi-fungsi Pembangunan dan Urusan-Urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah maka permasalahan-permasalahan dari isu strategis dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dalam konteks fungsi pelayanan umum, meliputi :

- 1) Belum optimalnya dalam penerapan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
- 2) Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap permasalahan Sosial .
- 3) Terbatasnya kompetensi dan kapasitas Sumber Daya aparatur.
- 4) Reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
- 5) Terbatasnya kapasitas dan belum optimalnya alokasi anggaran keuangan untuk melaksanakan program kegiatan .
- 6) Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan manajemen aset daerah.
- 7) Implementasi kebijakan komunikasi dan informasi terhadap permasalahan Sosial belum optimal.
- 8) Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran.

2. Dalam konteks fungsi pelayanan sosial, yang meliputi :

- 1) Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Gelandangan, Pengemis, Anak Terlantar, Wanita Tuna Susila) yang dapat mengganggu ketertiban dan Keamanan lingkungan;
- 2) Menguatnya gejala perilaku asusila, penyalahgunaan narkoba, pornografi, dan perjudian;
- 3) Terbatasnya SDM serta sarana dan prasarana dalam penanggulangan dan penanganan bencana;
- 4) Belum optimalnya Pelayanan bagi Pemerlu Atensi Sosial (PAS);
- 5) Belum Optimalnya kebijakan, Sinkronisasi dan Koordinasi dalam upaya-upaya penanganan dan penanggulangan Pemerlu Atensi Sosial (PAS);
- 6) Kuantitas ketersediaan data Pemerlu Atensi Sosial (PAS) mengalami perubahan seiring meningkatnya laju pertumbuhan penduduk;
- 7) Meningkatnya jumlah Pemerlu Atensi Sosial (PAS);
- 8) Rendahnya akses ke pelayanan sosial dasar bagi penyandang cacat.
- 9) Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial;
- 10) Rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial;
- 11) Belum optimalnya fungsi dan tugas kelembagaan sosial (LKS, LK3, K3S, FK PSM dan Karang Taruna) dalam memerankan fungsinya sebagai agen perubahan sosial;
- 12) Rendahnya keterampilan penduduk miskin;

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dibidang sosial Kota Jambi perlu upaya-upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan kebijaksanaan program operasional dan kegiatan-kegiatan.

Upaya strategis yang akan dilaksanakan dalam pembangunan sosial tidak terlepas dari kondisi yang mendukung kegiatan dan faktor-faktor lain dari kegiatan dimaksud. Kondisi yang akan diuraikan ini dilakukan melalui beberapa analisis yaitu analisis yaitu analisis lingkungan internal dan eksternal.

Analisis lingkungan internal

1. Kekuatan (*Strength*)

- a. Jumlah PSKS yang memadai seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebanyak 1 orang, Pendamping Rehabilitasi Sosial 3 orang, Taruna Siaga Bencana 30 orang, Fasilitator Kelurahan 68 orang, Lembaga Kesejahteraan Sosial 58 lembaga serta keberadaan pilar sosial dan mitra sosial yang memadai dalam mendukung dan membantu tugas-tugas

pelayanan kesejahteraan sosial;

- b. Terbentuknya struktur kelembagaan Dinas Sosial Kota Jambi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi;
- c. Adanya regulasi dan dukungan kebijakan sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia) dan Penyandang Disabilitas;
- d. Adanya regulasi dan dukungan kebijakan sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 terkait penanggulangan kemiskinan di Kota Jambi;
- e. Adanya regulasi dan dukungan kebijakan sesuai Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016 terkait Penanganan Gelandangan, Pengemis (Gepeng) dan Anak Jalanan;
- f. Adanya regulasi dan dukungan kebijakan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu;
- g. Adanya regulasi dan dukungan kebijakan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 50 Tahun 2021 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kota Jambi.

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Ketidaksesuaian data Pemerlu Atensi Sosial seiring dengan pertumbuhan penduduk;
- b. Belum adanya regulasi terkait anak rentan dan lansia terlantar;
- c. Belum optimalnya produktivitas sumber daya aparatur dan PSKS Dinas Sosial;
- d. Belum optimalnya anggaran terutama bagi Standar Pelayanan Minimal dibidang sosial yang berdampak pada efektivitas pelayanan PAS;

Analisis Lingkungan Eksternal

1. Peluang (*Opportunity*)

- a. Stabilitas keamanan daerah yang kondusif dan terjaga dengan baik;
- b. Sinkronisasi dan Koordinasi antara Pemerintah, Kelembagaan Organisasi, Masyarakat dan Pelaku Dunia Usaha dalam mengatasi masalah-masalah Kesejahteraan Sosial;
- c. Peningkatan peran/partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah-masalah Kesejahteraan Sosial;
- d. Potensi sumber daya alam yang masih tersedia yang membuka peluang dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial;

- e. Keterlibatan dan peran serta aktif Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang semakin baik dan bekerja sama dalam menangani masalah kesejahteraan sosial seperti yayasan, Panti Sosial, LK3, K3S dan Karang Taruna sesuai fungsi sosialnya;
 - f. Partisipasi dunia usaha dilakukan melalui program corporate sosial responsibility (CSR) merupakan implementasikan tanggung jawab & kepedulian perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan dan pelayanan kesejahteraan sosial.
2. Ancaman (*Threats*)
- a. Kurangnya pemanfaatan potensi dan sumber daya pembangunan kesejahteraan sosial ;
 - b. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat yang berdampak luas terhadap masalah sosial lainnya seperti rendahnya semangat kerja, kurang kreatif , mandiri dan kurang percaya diri;
 - c. Belum optimalnya produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Jambi.

2.2.2 Isu strategis

Dari uraian permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka teridentifikasi atau terangkum sebagai isu strategis yang dihadapi berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah, dalam kurun waktu tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Sikronisasi data Pemerlu Atensi Sosial (PAS) seiring dengan pertumbuhan penduduk;
2. Regulasi kebijakan terkait PAS;
3. Angka kemiskinan dan tingkat produktivitas PAS;
4. Peningkatan kontribusi peran serta kelembagaan kesejahteraan sosial dalam penanganan dan penanggulangan masalah-masalah sosial;
5. Banyaknya PAS yang berasal dari luar daerah;
6. Peningkatan dan Optimalisasi anggaran urusan sosial

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029

Tujuan strategi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategi ini maka dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Jambi dalam memenuhi RPJMD untuk kurun waktu lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategi ini juga akan memungkinkan Dinas Sosial Kota Jambi untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategi dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran organisasi.

Penetapan tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan RPJMD dan didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan, penekanan pada faktor kunci keberhasilan dimaksudkan agar dalam pencapaian tujuan benar-benar telah memperhatikan faktor lingkungan dan mengetahui secara jelas kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

Adapun Tujuan Strategis Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025 - 2029 yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan efektivitas Kebijakan perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
2. Meningkatkan Profesionalisme ASN, Akuntabilitas Kinerja OPD dan Pelayanan Publik Berbasis TIK.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029

Sasaran strategis Dinas Sosial Kota Jambi merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana kerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran strategis Dinas Sosial Kota Jambi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang. Sasaran-sasaran yang RENSTRA (2025-2029) DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategik yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategik terkait juga telah dapat dicapai.

Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan sasaran dan program merupakan penjabaran dari tujuan secara teratur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh suatu instansi/organisasi Pemerintah.

Untuk mencapai Tujuan Strategis tersebut di atas, maka sasaran strategis dari Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Atensi Sosial (PAS);
2. Peningkatan Profesionalisme ASN;
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada Tabel. 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Jambi

NSPK	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					KET
				2025	2026	2027	2028	2029	
	Peningkatan efektivitas Kebijakan perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan		Persentase PAS yang mendapatkan perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial	80%	80%	80%	80%	80%	
			Persentase capaian Program Perlindungan , jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial terhadap Data Kemiskinan	80%	80%	80%	80%	80%	
			Indeks Kualitas Keluarga	50%	50%	50%	50%	50%	
			Persentase Pas menerima Jaminan perlindungan Sosial	80%	80%	80%	80%	80%	

NSPK	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					KET
				2025	2026	2027	2028	2029	
			Persentase Keterlibatan Masyarakat dan penegakan Pranata Sosial	80%	80%	80%	80%	80%	
		Peningkatan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Atensi Sosial (PAS)	Persentase PAS yang mendapatkan layanan dasar	80%	80%	80%	80%	80%	
			Indeks Kemandirian PAS	50%	50%	50%	50%	50%	
			Rasio Kontribusi PSKS	80%	80%	80%	80%	80%	
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Respon Penanganan Pengaduan Sosial	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
	Meningkatkan Profesionalisme ASN, Akuntabilitas Kinerja OPD dan Pelayanan Publik Berbasis TIK		Penilaian Kinerja Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik Urusan Sosial	A	A	A	A	A	
		Peningkatan Profesionalisme ASN	Penilaian mandiri reformasi birokrasi	A	A	A	A	A	
			Persentase tata kelola dan kinerja pengelolaan keuangan OPD	100%	100%	100%	100%	100%	

Untuk perhitungan indikator pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Sosial, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

1. Persentase pelayanan dasar = $\frac{\text{Jumlah PAS yang terlayani}}{\text{Total target PAS}} \times 100$
2. Indeks Kemandirian = $\frac{\text{Jumlah (skor variabel x bobot variabel)}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$
3. Rasio Kontribusi PSKS = $\frac{\text{Jumlah unsur PSKS jenis i}}{\text{Jumlah total seluruh unsur PSKS}} \times 100$
4. Penilaian mandiri reformasi birokrasi = Hasil penilaian kematangan OPD, Pelayanan publik, IP ASN, SAKIP, RB dan SKM
5. Persentase penyerapan keuangan = $\frac{\text{Jumlah realisasi Anggaran /Fisik}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100$
6. Respon penanganan pengaduan = $\frac{\text{Jumlah pengaduan yang di selesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100$

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu Strategi yang tepat dan akurat, guna mencapai hasil yang optimal untuk lima tahun kedepan. Adapun strategi yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah :

1. Peningkatan Penanganan Rehabilitasi Sosial PAS Terlantar di Luar Panti;
2. Peningkatan pelayanan perlindungan sosial bagi PAS;
3. Peningkatan Kapasitas PSKS dalam Kesejahteraan Sosial;
4. Peningkatan pelayanan Jaminan Sosial bagi PAS;

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan–tindakan tertentu. Elemen penting dalam menyiapkan kebijaksanaan yang cocok adalah dapat dilaksanakan dan tidak hanya baik secara teoritis. Kebijakan meliputi ketentuan–ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan yang dikembangkan Dinas Sosial Kota Jambi meliputi :

1. Meningkatkan penanganan rehabilitasi sosial PAS terlantar di luar panti;
2. Meningkatkan pelayanan perlindungan sosial bagi PAS;
3. Meningkatkan Kapasitas PSKS dalam kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial bagi PAS.

Adapun kebijakan Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025-2029 yang diambil dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi dapat dirumuskan sebagai berikut:

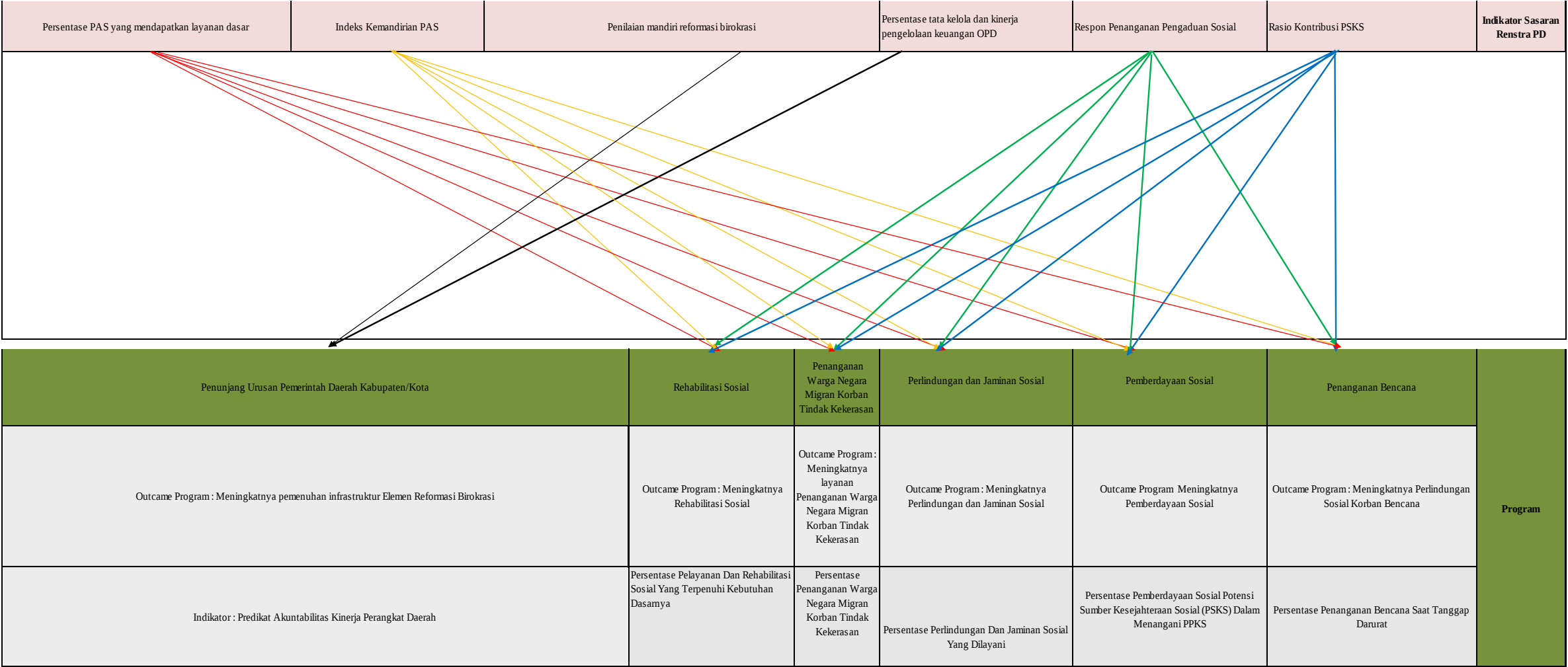
- 1) Peningkatan kesejahteraan sosial dan Pemberian bantuan sosial bagi Pemerlu Atensi Sosial (PAS);
- 2) Peningkatan Pembinaan dan keterampilan Pemerlu Atensi Sosial (PAS) dan Partisipasi masyarakat yang optimal sebagai kekuatan dalam memecahkan permasalahan yang dialami oleh PAS;
- 3) Peningkatan fungsi dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan masalah-masalah Kesejahteraan Sosial.

3.5 Cascading Kinerja Dinas Sosial Kota Jambi

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.

Cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat serta memiliki keterkaitan sinergitas. Berikut Cascading yang ada pada Dinas Sosial Kota Jambi:

CASCADING KINERJA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI TAHUN 2025-2029													
Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing				Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					Meningkatnya ketertiban, ketentraman umum, perlindungan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Tujuan RPJMD	
Indeks Pembangunan Manusia				Laju Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Reformasi Birokrasi					Indeks Rasa Aman		Indikator Tujuan	
Peningkatan Derajat Kesehatan	Peningkatan Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan	Penurunan Angka Kemiskinan	Tercapainya Peningkatan Keluarga Yang Berkualitas	Penurunan Gini Ratio	Meningkatkan Profesionalisme ASN, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dan Pelayanan Publik Berbasis TIK				Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak		Sasaran RPJMD
Umur Harapan Hidup (UHH)	Harapan Lama Sekolah (HLS) Rata -Rata Lama Sekolah (RLS)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)	Gini Ratio	Indeks Pemerintah Digital	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai SAKIP	Nilai Manuritas Penyelenggaraan SPIP	Indeks Inovasi Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Hamoni Indonesia	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indikator Sasaran
Pemerlu Atensi Sosial (PAS)													Key Success Factor
Peningkatan efektivitas Kebijakan perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial					Meningkatkan Profesionalisme ASN, Akuntabilitas Kinerja OPD dan Pelayanan Publik Berbasis TIK					Peningkatan efektivitas Kebijakan perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial		Tujuan Renstra PD	
Persentase PAS yang mendapatkan perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial		Persentase capaian Program Perlindungan , jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial terhadap Data Kemiskinan	Indeks Kualitas Keluarga	Persentase Pas menerima Jaminan perlindungan Sosial	Penilaian Kinerja Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik Urusan Sosial					Persentase Keterlibatan Masyarakat dan penegakan Pranata Sosial		Indikator Tujuan Renstra PD	
Peningkatan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Atensi Sosial (PAS)					Peningkatan Profesionalisme ASN					Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Atensi Sosial (PAS)		Sasaran Renstra PD



Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								Rehabilitasi Sosial	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemberdayaan Sosial		Penanganan Bencana		Program		
Indikator : Niali AKIP Perangkat Daerah	Indikator : Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	Indikator : Persentase Penyampaian hasil rekonsiliasi BMD tepat waktu	Indikator : IP ASN Perangkat Daerah	Indikator : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	Indikator : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	Indikator : Persentase pemenuhan jasa pemunjang urusan pemerintah dearah	Indikator : Persentase peningkatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik (layak pakai)	Indikator : Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang di layani	Indikator : Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti yang di layani	Indikator : Persentase Orang Terlantar yang dipulangkan	Indikator : Persentase anak-anak terlantar yang dilayani	Indikator : Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin	Indikator : Persentase Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin PUB	Indikator : Persentase PSKS yang diberdayakan	Indikator : Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang ditangani	Indikator : Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Kegiatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya .	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Penyediaan Pemakanan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang Atau Barang	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Sub Kegiatan
Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indikator : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Indikator : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Indikator : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Pengadaan Mebel.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Penyediaan Sandang	Pemberian Layanan Kedaruratan		Rujukan Anak-Anak Terlantar	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								Rehabilitasi Sosial		Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Perlindungan dan Jaminan Sosial		Pemberdayaan Sosial	Penanganan Bencana			Program
Indikator : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Indikator : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indikator : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Indikator : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Pemakanan		Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	
Indikator : Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indikator : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Indikator : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Indikator : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Indikator : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indikator : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Penyediaan Sandang		Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Pelayanan Dukungan Psikososial	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Rehabilitasi Sosial		Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Perlindungan dan Jaminan Sosial		Pemberdayaan Sosial	Penanganan Bencana			Program	
Indikator : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Indikator : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Indikator : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Indikator : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Indikator : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Jumlah Usulan Penindakdayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan		Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kepentingan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Sub Kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.		Fasilitasi Kunjungan Tamu. Indikator : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.		Pemeliharaan Mebel.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Penyediaan Alat Bantu				Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana		
Indikator : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Indikator : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Indikator : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indikator : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Indikator : Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya.		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana		

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Rehabilitasi Sosial		Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemberdayaan Sosial	Penanganan Bencana		Program
Indikator : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		Indikator : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	Sub Kegiatan
Evaluasi Kinerja Perangkat			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah		
Indikator : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Indikator : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Indikator : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana		
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA					

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Rehabilitasi Sosial		Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemberdayaan Sosial	Penanganan Bencana	Program
	Indikator : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota					
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak					
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota					
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					
Sub Kegiatan									

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sosial		Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemberdayaan Sosial	Penanganan Bencana	Program
RENSTRA (2025-2029) DINAS SOSIAL KOTA JAMBI	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota					Sub Kegiatan
	Pemberian Layanan Rujukan	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga					
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga					
	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Pemberian Layanan Rujukan					

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sosial		Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemberdayaan Sosial	Penanganan Bencana	Program
	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota					Sub Kegiatan
	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota					
	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota					
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota					

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sosial		Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemberdayaan Sosial	Penanganan Bencana	Program
	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya					Sub Kegiatan
	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya					
		Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya					
		Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi					
Sekretariat	Bidang Rehabilitasi Sosial			Bidang Jaminan Sosial	Bidang Pemberdayaan Sosial	Bidang Perlindungan Sosial	Penanggung Jawab

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan sasaran yang harus dilaksanakan serta permasalahan-permasalahan yang diprediksi dalam bidang perencanaan maka rencana dari program-program yang akan dilaksanakan berdasarkan Skala Prioritas RPJMD Kota Jambi pada Rencana Strategis (Renstra) OPD Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025 - 2029 dapat di jabarkan pada program sebagai berikut :

- 2.2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2.2.2. Program Pemberdayaan Sosial
- 2.2.3. Program Program Rehabilitasi Sosial
- 2.2.4. Program Perlindungan Jaminan Sosial
- 2.2.5. Program Penanganan Bencana

4.2 Uraian Kegiatan

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan sasaran yang harus dilaksanakan serta permasalahan-permasalahan yang diprediksi dalam bidang perencanaan maka rencana dari kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Skala Prioritas RPJMD Kota Jambi pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025-2029 dapat di jabarkan pada kegiatan sebagai berikut :

- 2.2.5.1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2.2.5.1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2.2.5.1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 2.2.5.1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 2.2.5.1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 2.2.5.1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 2.2.5.1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2.2.5.1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2.2.5.1.9. Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 2.2.5.1.10. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
- 2.2.5.1.11. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- 2.2.5.1.12. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
- 2.2.5.1.13. Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
- 2.2.5.1.14. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
- 2.2.5.1.15. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- 2.2.5.1.16. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- 2.2.5.1.17. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator Target dan Pagu Indikatif

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan sasaran yang harus dilaksanakan serta permasalahan-permasalahan yang diprediksi dalam bidang perencanaan maka rencana dari Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator target dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan berdasarkan Skala Prioritas RPJMD Kota Jambi pada Rencana Strategis (Renstra) OPD Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025 - 2029 dapat di jabarkan pada program kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
10. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
11. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
12. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
13. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
14. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
15. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
16. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
17. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
18. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
19. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
21. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
22. Fasilitasi Kunjungan Tamu
23. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
24. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
25. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
26. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
27. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
28. Pengadaan Mebel
29. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
30. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
31. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
32. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
33. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
34. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
35. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
36. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

37. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
38. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
39. Pemeliharaan Mebel
40. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
41. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
42. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
43. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
44. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
45. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
46. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
47. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
48. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
49. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota
50. Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan
51. Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
52. Penyediaan Permakanan
53. Penyediaan Sandang
54. Penyediaan Alat Bantu
55. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
56. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
57. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas

Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

58. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
59. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
60. Pemberian Layanan Kedaruratan
61. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
62. Pemberian Layanan Rujukan
63. Penyediaan Perbekalan Kesehatan
64. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial
65. Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis
66. Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
67. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
68. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
69. Pemberian Layanan Kedaruratan
70. Penyediaan Permakanan
71. Penyediaan Sandang
72. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
73. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
74. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
75. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
76. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
77. Pemberian Layanan Rujukan
78. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
79. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal

80. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
81. Rujukan Anak-Anak Terlantar
82. Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
83. Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi
84. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
85. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
86. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
87. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
88. Penyediaan Makanan
89. Penyediaan Sandang
90. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
91. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
92. Pelayanan Dukungan Psikososial
93. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
94. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
95. Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda
96. Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana
97. Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana
98. Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana
99. Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana.

Tabel 4.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Jambi

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
	Peningkatan efektivitas Kebijakan perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial	Peningkatan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Atensi Sosial (PAS)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial		Nilai AKIP Perangkat Daerah		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Meningkatkan Profesionalisme ASN, Akuntabilitas Kinerja OPD dan Pelayanan Publik Berbasis TIK	Peningkatan Profesionalisme ASN			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Persentase Penyampaian Hasil Rekonsiliasi BMD Tepat Waktu		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				IP ASN Perangkat Daaerah		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			Tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Dinas atau Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Rehabilitasi Sosial		Persentase Rehabilitasi Sosial yang Dilayani	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang dilayani kewenangan Kabupaten/Kota		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia, Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Permakanan	
				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Alat Bantu	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
				Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
				Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Kedaruratan	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
				Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Rujukan	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	
				Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	
				Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	
				Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	
			Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang dilayani kewenangan Kabupaten/Kota		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Kedaruratan	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Permakanan	
				Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Alat Bantu	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
				Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
				Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
				Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Rujukan	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
				Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	
				Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	
				Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Yang dilayani dan Persentase Fakir Miskin yang Didata dan dilayani	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota		Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rujukan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	
					Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	
				Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial		Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Menangani PPKS	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
				Meningkatnya Kapasitas PSKS Daerah Kabupaten/Kota		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
					Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	
			Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan		Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
				Persentase OT yang dipulangkan		Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
					Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana		Persentase Penanganan Bencana saat tanggap darurat	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Dasar dalam masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Alam, non Alam dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	
					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	
				Meningkatnya kapasitas Taruna Siaga Bencana dalam penanganan Kesiapsiagaan masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Alam, non Alam dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
					Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	
					Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	
					Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	
					Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	
			Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan		Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
				Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Dearah Dinas Sosial Kota Jambi

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGG UNG JAWAB
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB	7,660,689,051	A	8,467,368,000	A	9,507,981,000	A	9,615,959,000	A	10,030,367,000	A	9,743,022,000	DINAS SOSIAL
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	17,554,800	A	18,350,000	A	19,500,000	A	19,500,000	A	19,500,000	A	19,500,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	14,504,800	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	16,000,000	2 Dokumen	16,000,000	2 Dokumen	16,000,000	2 Dokumen	16,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	-		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	-		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN											PD PENANGG UNG JAWAB
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	-		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	3,050,000	4 Laporan	3,350,000	4 Laporan	3,500,000	4 Laporan	3,500,000	4 Laporan	3,500,000	4 Laporan	3,500,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	5,943,045,317	100%	6,579,718,000	100%	7,114,281,000	100%	7,213,789,000	100%	7,545,683,000	100%	7,658,086,000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/Bulan	5,721,095,317	87 Orang/Bulan	6,335,718,000	87 Orang/Bulan	6,969,281,000	87 Orang/Bulan	7,068,789,000	87 Orang/Bulan	7,400,683,000	87 Orang/Bulan	7,513,086,000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-												
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	221,950,000	36 Dokumen	244,000,000	36 Dokumen	145,000,000	36 Dokumen	145,000,000	36 Dokumen	145,000,000	36 Dokumen	145,000,000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-												

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN											PD PENANGG UNG JAWAB
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-												
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-												
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian hasil rekonsiliasi BMD tepat waktu	100%	30,550,000	100%	33,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	30,550,000	12 Laporan	33,000,000	12 Laporan	35,000,000	12 Laporan	35,000,000	12 Laporan	35,000,000	12 Laporan	35,000,000	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	60	121,220,000	85	133,700,000	85	140,000,000	85	140,000,000	85	140,000,000	60	140,000,000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	82 Paket	54,200,000	87 Paket	60,000,000	87 Paket	65,000,000	87 Paket	65,000,000	87 Paket	65,000,000	87 Paket	65,000,000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	-	12 Dokumen	3,000,000	12 Dokumen	3,300,000	12 Dokumen	3,600,000	12 Dokumen	3,960,000	12 Dokumen	4,300,000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	67,020,000	87 Orang	70,700,000	87 Orang	71,700,000	87 Orang	71,400,000	87 Orang	71,040,000	87 Orang	70,700,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN											PD PENANGG UNG JAWAB
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	100%	471,596,534	100%	518,600,000	100%	335,000,000	100%	335,000,000	100%	417,514,000	100%	445,000,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16,776,580	1 Paket	18,400,000	1 Paket	22,000,000	1 Paket	22,000,000	1 Paket	22,000,000	1 Paket	22,000,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,258,604	1 Paket	55,280,000	1 Paket	55,500,000	1 Paket	55,500,000	1 Paket	55,500,000	1 Paket	55,500,000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-											
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22,201,350	1 Paket	24,420,000	1 Paket	27,500,000	1 Paket	27,500,000	1 Paket	27,500,000	1 Paket	27,500,000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-											
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	217,360,000	12 Laporan	239,000,000	12 Laporan	145,000,000	12 Laporan	145,000,000	12 Laporan	227,514,000	12 Laporan	245,000,000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-											
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		165,000,000	12 Laporan	181,500,000	12 Laporan	85,000,000	12 Laporan	85,000,000	12 Laporan	85,000,000	12 Laporan	95,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGG UNG JAWAB
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	100%		100 %	0	100 %	870,000,000	100 %	870,000,000	100 %	870,000,000	100 %	520,000,000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					2 Unit	700,000,000	2 Unit	700,000,000	2 Unit	700,000,000	1 Unit	300,000,000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					10 Unit	50,000,000	10 Unit	50,000,000	10 Unit	50,000,000	10 Unit	50,000,000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan													
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					20 Unit	70,000,000	20 Unit	70,000,000	20 Unit	70,000,000	20 Unit	70,000,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					20 Unit	50,000,000	20 Unit	50,000,000	20 Unit	50,000,000	20 Unit	100,000,000	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan													
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN											PD PENANGG UNG JAWAB
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa pemunjang urusan pemerintah daerah	100%	470,282,400	100 %	517,000,000	100 %	419,500,000	100 %	419,500,000	100 %	419,500,000	100 %	519,500,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7,050,000	12 Laporan	7,500,000	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	248,200,000	12 Laporan	273,000,000	12 Laporan	173,000,000	12 Laporan	173,000,000	12 Laporan	173,000,000	12 Laporan	273,000,000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	100,000,000	12 Laporan	100,000,000	12 Laporan	100,000,000	12 Laporan	100,000,000	12 Laporan	100,000,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	215,032,400	12 Laporan	136,500,000	12 Laporan	136,500,000	12 Laporan	136,500,000	12 Laporan	136,500,000	12 Laporan	136,500,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik (layak pakai)	100%	606,440,000	100 %	667,000,000	100 %	574,700,000	100 %	583,170,000	100 %	583,170,000	100 %	705,936,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	483,030,000	35 Unit	531,300,000	35 Unit	431,300,000	35 Unit	431,300,000	35 Unit	431,300,000	35 Unit	531,300,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN											PD PENANGG UNG JAWAB
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	70,000,000	5 Unit	77,000,000	5 Unit	84,700,000	5 Unit	93,170,000	5 Unit	93,170,000	5 Unit	115,936,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	53,410,000	10 Unit	58,700,000	10 Unit	58,700,000	10 Unit	58,700,000	10 Unit	58,700,000	10 Unit	58,700,000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara													
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara													
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi													
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial yang dilayani	100%	1,156,249,151	100%	1,307,690,000	100%	1,067,500,000	100%	1,098,000,000	100%	972,500,000	100%	1,380,500,000	DINAS SOSIAL
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia, Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang di layani	100%	686,749,951	100%	859,350,000	100%	822,500,000	100%	842,500,000	100%	772,500,000	100%	860,500,000	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	214,700,000	275 Orang	266,100,000	300 Orang	280,000,000	375 Orang	300,000,000	300 Orang	280,000,000	300 Orang	280,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN											PD PENANGG UNG JAWAB
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	68,665,000	275 Orang	150,000,000	300 Orang	150,000,000	375 Orang	150,000,000	250 Orang	100,000,000	250 Orang	100,000,000	
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	150,000,000	85 Orang	150,000,000	90 Orang	175,000,000	95 Orang	175,000,000	100 Orang	175,000,000	110 Orang	176,000,000	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	50 Orang	15,000,000	75 Orang	15,000,000	100 Orang	15,000,000	125 Orang	15,000,000	150 Orang	16,000,000	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	231,343,746	200 Orang	254,250,000	225 Orang	75,000,000	250 Orang	75,000,000	275 Orang	75,000,000	300 Orang	261,000,000	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGG UNG JAWAB
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota													
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang												
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	22,041,205	200 Orang	24,000,000	250 Orang	27,500,000	250 Orang	27,500,000	250 Orang	27,500,000	250 Orang	27,500,000	
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-												
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-												

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGG UNG JAWAB
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemberian Lay anan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Lay anan Rujukan Kew enangan Kabupaten/Kota	-												
Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi					30 Orang	100,000,000	30 Orang	100,000,000	30 Orang	100,000,000			
Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah orang yang mendapatkan lay anan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kew enangan Kabupaten/Kota													
Peny ediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kew enangan Kabupaten/Kota													
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN											PD PENANGG UNG JAWAB
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti yang di layani	100%	469,499,200	100%	448,340,000	100%	245,000,000	100%	255,500,000	0	200,000,000	100%	200,000,000	
Pemberian Lay anan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kew enangan Kabupaten/Kota	-		200 Orang	20,000,000	300 Orang	20,000,000	300 Orang	20,000,000	300 Orang	20,000,000	300 Orang	20,000,000	
Pemberian Lay anan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelay anan Kedaruratan Kew enangan Kabupaten/Kota	250 Orang	469,499,200	200 Orang	128,340,000	300 Orang	100,000,000	300 Orang	100,000,000	300 Orang	100,000,000	300 Orang	100,000,000	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kew enangan Kabupaten/Kota	200 Orang		200 Orang	200,000,000	300 Orang	50,000,000	300 Orang	50,000,000	300 Orang	50,000,000	300 Orang	50,000,000	
Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kew enangan Kabupaten/Kota	-		200 Orang	100,000,000	300 Orang	30,000,000	300 Orang	30,000,000	300 Orang	30,000,000	300 Orang	30,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN											PD PENANGG UNG JAWAB
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	-												
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	-												
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-												
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	-												

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN											PD PENANGG UNG JAWAB
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	-												
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-												
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-												
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-			200 Orang	45,000,000	225 Orang	55,500,000						

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										P D PENANGG UNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Yang dilayani	100%	100%	1,520,950,000	100%	1,987,340,000	100%	2,013,503,000	100%	2,023,182,000	100%	2,028,500,000	DINAS SOSIAL
Kegiatan Pemeliharaan Anak- Anak terlantar	Persentase anak-anak terlantar yang dilayani	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	
Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang											
Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-											
Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota												
Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi												

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN											PD PENANGG UNG JAWAB
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin	100%	2,933,994,235	100%	1,520,950,000	100%	1,987,340,000	100%	2,013,503,000	100%	2,010,985,000	100%	2,028,500,000	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	23000 Keluarga	825,855,235	20000 Keluarga	562,250,000	20200 Keluarga	700,000,000	20400 Keluarga	704,000,000	20600 Keluarga	710,000,000	20800 Keluarga	710,500,000	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6882 Keluarga	1,902,875,000	7500 Keluarga	760,700,000	8250 Keluaraga	1,060,700,000	8500 Keluaraga	1,080,700,000	8750 Keluaraga	1,072,182,000	9000 Keluaraga	1,073,000,000	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	205,264,000	200 Orang	198,000,000	225 Orang	226,640,000	250 Orang	228,803,000	250 Orang	228,803,000	300 Orang	245,000,000	
Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN											PD PENANGG UNG JAWAB
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	39,750,000	100%	40,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	DINAS SOSIAL
Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran yang dipulangkan	100%	39,750,000	100%	40,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	39,750,000	250 Orang	40,000,000	275 Orang	50,000,000	275 Orang	50,000,000	275 Orang	50,000,000	275 Orang	50,000,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Menangani PPKS	100%	1,516,661,850	100 %	1,357,950,000	100 %	1,388,951,000	100 %	1,428,200,000	100 %	1,455,700,000	100 %	1,489,200,000	DINAS SOSIAL
Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin PUB	100%	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN											PD PENANGG UNG JAWAB
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-												
Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang diberdayakan	100%	1,516,661,850	100 %	1,357,950,000	100 %	1,388,951,000	100 %	1,428,200,000	100 %	1,455,700,000	100 %	1,489,200,000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	68 Orang	430,479,600											
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	140,800,000											
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	-	69 Orang	379,200,000	69 Orang	379,200,000	69 Orang	379,200,000	69 Orang	379,200,000	69 Orang	379,200,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN											PD PENANGG UNG JAWAB
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Keluarga	677,730,500	200 Keluarga	600,000,000	225 Keluarga	620,000,000	250 Keluarga	650,000,000	275 Keluarga	675,000,000	300 Keluarga	700,000,000	
Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	-	-	50 Orang	111,100,000	50 Orang	120,000,000	50 Orang	125,000,000	50 Orang	130,000,000	50 Orang	135,000,000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Lembaga	259,071,750	55 Lembaga	259,070,000	55 Lembaga	260,571,000	55 Lembaga	264,000,000	55 Lembaga	259,000,000	55 Lembaga	260,000,000	
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat	8,580,000	20 Orang	8,580,000	20 Orang	9,180,000	20 Orang	10,000,000	20 Orang	12,500,000	20 Orang	15,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN											PD PENANGG UNG JAWAB
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial													
Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi													
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana saat tanggap darurat	100%	452,366,213	100%	502,450,000	100%	557,825,000	100%	595,625,000	100%	560,000,000	100%	610,000,000	DINAS SOSIAL
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Bencana Alam dan Sosial yang ditangani	100%	206,624,400	100%	252,450,000	100%	297,825,000	100%	335,625,000	100%	300,000,000	100%	350,000,000	
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	47,500,000	300 Orang	70,000,000	350 Orang	100,000,000	375 Orang	120,000,000	350 Orang	100,000,000	375 Orang	120,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN											PD PENANGG UNG JAWAB
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	101,624,400	300 Orang	111,700,000	350 Orang	120,000,000	375 Orang	125,000,000	300 Orang	100,000,000	350 Orang	120,000,000	
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Unit	50,000,000	7 Unit	55,000,000	10 Unit	60,500,000	13 Unit	66,550,000	16 Unit	70,000,000	20 Unit	77,000,000	
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	-	50 Orang	7,500,000	75 Orang	8,250,000	100 Orang	14,075,000	125 Orang	15,000,000	150 Orang	16,500,000	
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	7,500,000	100 Orang	8,250,000	125 Orang	9,075,000	150 Orang	10,000,000	175 Orang	15,000,000	200 Orang	16,500,000	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	100%	245,741,813	100 %	250,000,000	100 %	260,000,000	2 Kampung	260,000,000	2 Kampung	260,000,000	2 Kampung	260,000,000	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kampung		2 Kampung	0	2 Kampung	0	2 Kampung	0	2 Kampung	0	2 Kampung	0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN											PD PENANGG UNG JAWAB
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	245,741,813	50 Orang	250,000,000	50 Orang	260,000,000	50 Orang	260,000,000	50 Orang	260,000,000	50 Orang	260,000,000	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	-		100 %		100 %		1 Makam		1 Makam		1 Makam		DINAS SOSIAL
Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-		1 Makam		1 Makam		1 Makam		1 Makam		1 Makam		
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	-		1 Makam		1 Makam		1 Makam		1 Makam		1 Makam		
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
Jumlah Total			13,759,710,500		13,196,408,000		14,559,597,000		14,801,287,000		15,079,552,000		15,281,222,000	

Tabel 4.4 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah				
No	Program Prioritas	Outcame	Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia, Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			Penyediaan Permakanan	
			Penyediaan Sandang	
			Penyediaan Alat Bantu	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
			Pemberian Layanan Kedaruratan	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			Pemberian Layanan Rujukan	
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan	
			Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	
			Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	
			Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	
			Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
			Pemberian Layanan Kedaruratan	
			Penyediaan Permakanan	
			Penyediaan Sandang	
			Penyediaan Alat Bantu	
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			Pemberian Layanan Rujukan	
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	
			Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	
			Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	

No	Program Prioritas	Outcame	Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan Dan Jaminan Sosial Yang Dilayani	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak terlantar	
			Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	
			Rujukan Anak-Anak Terlantar	
			Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	
			Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	
			Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Menangani PPKS	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
			Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
			Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	
			Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana saat tanggap darurat	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Makanan	
			Penyediaan Sandang	
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
			Pelayanan Dukungan Psikososial	
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
			Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	
			Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	
			Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	
			Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	
			Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	

4.4 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sosial

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang cara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, untuk mengukur kinerja diperlukan indikator kinerja sasaran dan indikator kegiatan. Indikator kinerja sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada kurun waktu perencanaan strategis yang ditetapkan pada indikator kinerja kegiatan terbagi dalam lima kelompok indikator kinerja yaitu Indikator masukan (*Input*), keluaran (*Output*), hasil (*Outcome*), manfaat (*Benefits*), dan dampak (*Impacts*).

Indikator kinerja masukan yang disusun harus telah mengidentifikasi sumber daya apa yang tersedia untuk menghasilkan keluaran. Indikator keluaran lebih terkait dengan hasil fisik maupun jasa yang dicapai dengan dilaksanakan suatu kegiatan

Untuk mengetahui pemanfaatan keluaran yang dihasilkan oleh kegiatan perlu disusun indikator hasil yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka pendek maupun jangka menengah, indikator yang perlu disusun berikutnya adalah indikator yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan yaitu indikator manfaat dan dampak.

a. Pengukuran Kinerja

Salah satu kunci keberhasilan dalam implementasi perencanaan strategis adalah menyiapkan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Pengukuran kinerja mencakup :

- a) Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan

- b) Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam rencana kinerja

b. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan pengukuran kinerja oleh karena itu dalam melakukan evaluasi kinerja harus berpedoman pada ukuran yang telah disepakati dan ditetapkan.

Evaluasi kinerja juga merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dimasa datang. Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian sasaran. Dalam evaluasi kinerja didulukan pula analisis efesiensi dan efektifitas. Analisis efesiensi dilakukan dengan membandingkan antara output tertentu yang dihasilkan dengan input tertentu. Analisis efektivitas dilakukan untuk menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil.

Untuk mewujudkan kebijakan dan sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan beserta indikator kinerja pembangunan yang diharapkan dapat tercapai pada akhir periode RPJMD 2025–2029. Capaian tersebut ditargetkan selama kurun waktu 5 tahun ke depan yang ditempuh ke dalam target tahunan, sehingga kinerja pembangunan yang akan diimplementasikan oleh masing-masing OPD dapat terukur, terarah dan terkendali dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Program-program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya jangka menengah yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 2025–2029, diklasifikasikan berdasarkan prioritas dalam pembangunan Daerah Kota Jambi yaitu:

- (1) Kartu Bahagia;
- (2) Kampung Bahagia;
- (3) Lansia Bahagia;
- (4) *Call Center*.

Penetapan rencana strategis adalah langkah awal dalam proses pengukuran kinerja. Dalam proses tersebut sistem pengukuran kinerja akan relevan jika konteks

dalam suatu organisasi telah terbentuk kesepakatan terhadap sasaran yang akan dicapai dan telah ditetapkan dengan baik serta langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapainya. Pengukuran kinerja akan memberikan makna pada tujuan, sasaran dan strategi jika hasil (*outcome*) sasaran maupun program/kegiatan dapat dikuantifikasi guna menetapkan harapan yang terukur (*measurable expectation*). Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu penggunaan sumber daya seperti anggaran sehingga dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan jika diperlukan.

Dalam sebuah proses pengukuran kinerja diperlukan pemilihan indikator kinerja. Dalam konteks Pemerintah Daerah Kota Jambi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu ditetapkan adanya indikator kinerja daerah. Selain indikator kinerja perlu juga dipertimbangkan adanya ketersediaan data terutama data statistik yang tepat.

Ketidaktepatan data yang digunakan akan menggagalkan pengukuran kinerja pemerintahan dalam menjalankan fungsinya. Kelemahan yang sering terjadi dalam pemilihan indikator kinerja adalah tidak konsisten karena tidak jelasnya dimensi yang hendak diukur. Oleh karena itu dalam penyusunan RPJMD diperlukan penetapan indikator kinerja yang akan dipergunakan dalam pengukuran capaian kinerja secara periodek dan sebagai cerminan efektivitas sasaran dan program serta anggaran yang dilaksanakan setiap tahun

Hasil Rekapitulasi Indikator Kinerja Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Jambi selama tahun 2025 - 2029 yang mendukung pencapaian setiap tujuan dan sasaran dari Program dan Kegiatan yang telah direncanakan, serta terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang mengacu kepada Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, tujuan dan Sasaran RPJMD, serta Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Jambi dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Jambi

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KET
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Persentase PAS yang mendapatkan layanan dasar	Persen	80%	80%	80%	80%	80%	
2	Rasio Kontribusi PSKS	Persen	80%	80%	80%	80%	80%	
3	Indeks Kemandirian PAS	Persen	50%	50%	50%	50%	50%	
4	Penilaian mandiri reformasi birokrasi	Bobot	A	A	A	A	A	
5	Persentase tata kelola dan kinerja pengelolaan keuangan OPD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Respon Penanganan Pengaduan Sosial	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Kota Jambi

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KET
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	orang	585	585	585	585	585	
2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	orang	585	585	585	585	585	
3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	orang	10	10	10	10	10	
4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	orang	585	585	585	585	585	
5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	unit	4	4	4	4	4	
6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	orang	250	250	250	250	250	
7	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	tempat	2	2	2	2	2	
8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	orang	150	150	150	150	150	
9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	orang	60	60	60	60	60	
10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	unit	3	3	3	3	3	
11	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	paket	7	7	7	7	7	
12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	orang	35	35	35	35	35	
13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	orang	2	2	2	2	2	
14	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	orang	26	26	26	26	26	
15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	orang	70	70	70	70	70	
16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	orang	70	70	70	70	70	
17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	orang	15	15	15	15	15	
18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	orang	20	20	20	20	20	
19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	orang	50	50	50	50	50	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KET
			2025	2026	2027	2028	2029	
20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	orang	120	120	120	120	120	
21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	orang	75	75	75	75	75	
22	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	jiwa	1650	1650	1650	1650	1650	
23	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	jiwa	275	275	275	275	275	
24	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	paket	7	7	7	7	7	
25	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	paket	3	3	3	3	3	
26	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	jiwa	50	50	50	50	50	
27	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	orang	30	30	30	30	30	

BAB V

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Jambi tahun 2025 - 2029 ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan dipakai sebagai acuan bagi segenap jajaran aparatur dilingkungan Dinas Kota Jambi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas dibidang Sosial.

Keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dibidang Sosial sesuai dengan Renstra ini disamping sangat tergantung dari peran serta masyarakat dan dunia usaha, aparatur, diperlukan juga sikap mental, tekad dan semangat serta komitmen yang tinggi dari para penyelenggaranya. Faktor-faktor ini dapat dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme dalam pengalamannya serta koordinasi yang semakin mantap, sehingga hasilnya dapat menjadi optima. Sebagai upaya mencapai hasil yang maksimal dari upaya pembangunan bidang Sosial Kota Jambi, maka harus diawali dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang mantap dan pengawasan yang kuat. Untuk keperluan dimaksud diharapkan ada dukungan kebijaksanaan Pemerintah Kota Jambi dalam penyediaan sumber daya yang diperlukan, yaitu SDM, sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang memadai.

Perencanaan strategis ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan anggaran Dinas Sosial yang merupakan perwujudan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kota Jambi. Tentunya rencana ini harus pula tertuang dalam APBD Kota Jambi, APBD Provinsi, dan APBN. Penyusunan Renstra Dinas Sosial telah disusun sesuai dengan program prioritas dan kondisi yang ada pada Dinas Sosial Kota Jambi yang dituangkan kedalam program dan kegiatan. Hal ini tidak akan ada artinya apabila tidak ditindak lanjuti pada tingkat operasional untuk mengimplementasikannya. Berkenaan dengan itu pula diharapkan kepada semua pihak terkait untuk mendukung merealisasikannya .

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025 - 2029 merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran, Kebijakan Program dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan Rencana Kerja (Renja OPD) berikutnya Untuk itu perlu ditentukan kaedah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Unit Kerja/Bidang dan Sekretariat Dinas Sosial Kota Jambi, masyarakat, dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program Renstra ini dengan sebaik-baiknya.
2. Unit Kerja/Bidang dan Sekretariat Dinas Sosial Kota Jambi dalam menyusun Renstra telah memuat Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Program sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi bidang. Untuk itu dalam membuat program agar disesuaikan dengan RPJMD Kota Jambi yang nantinya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja OPD.
3. Unit Kerja/bidang pada Dinas Sosial berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kota Jambi dengan Renstra Dinas Sosial Kota Jambi.
4. Unit Kerja/ Bidang pada Dinas Sosial Kota Jambi berkewajiban mengoptimalkan penggunaan sumberdaya untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra OPD tahun 2025-2029.

Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Renstra OPD tahun 2025 - 2029, maka Kepala Dinas Sosial Kota Jambi berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penjabaran Renstra ini kedalam Rencana Kerja OPD. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan Rencana Kerja (Renja) tahun berikutnya disesuaikan dengan Renstra yang telah ditetapkan.

Demikian Perencanaan Strategis Dinas Sosial Kota Jambi yang wajib dipahami, dihayati dan dilaksanakan oleh semua aparatur di lingkungan Dinas melalui kerja sama terpadu dengan instalasi terkait, LSM, kalangan dunia usaha dan masyarakat

Jambi, 19 September 2025

KEPALA DINAS,



YUNITA INDRAWATI, AP, MP

Pembina Utama Muda

NIP.19740607 199403 2 002